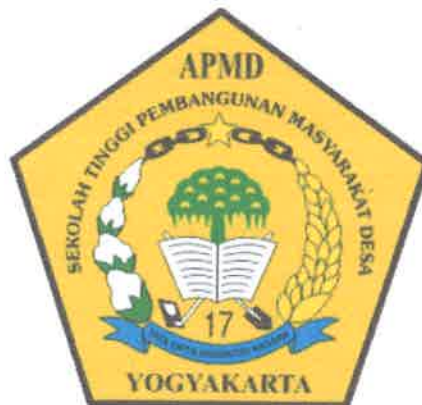


SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DI KALURAHAN
SENDANGSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
D.I. YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

**AMIRULLAH
NIM 21510009**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023

i



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jum'at, 4 Agustus 2023
Jam : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Aulia Widya Sakina, S. Sos., M.A.
Ketua Penguji/Pembimbing



Dra. Oktarina Albizzia, M.Si.
Penguji Samping I



Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial



Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

NIY 170 230 173

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amirullah
NIM : 21510009
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MAYARAKAT DI KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA* adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 03 Agustus 2023
Yang menyatakan



Amirullah
NIM. 21510009

MOTO

"Dalam Kesabaran, Kita Menemukan Kebijakan, dalam Tantangan, Kita Menemukan
Kemajuan"

"Menggenggam Cita, Melepaskan Candu"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam kerendahan hati, dengan rasa hormat dan penghormatan, penulis ingin mengabdikan halaman ini sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan, bimbingan, dan cinta yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Kepada Ibu dan Ayah tercinta, yang telah meninggalkan dunia ini namun tetap hidup dalam hati dan kenangan penulis. Semua jerih payah ini adalah untuk mengenang dan menghormati dedikasi dan cinta tanpa syarat yang telah kalian berikan sepanjang hidup.

Kepada keluarga tercinta, saudara-saudara, dan kerabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi tiang kokoh di balik setiap tantangan dan rintangan.

Kepada teman-teman sejati, baik yang telah bersama sejak masa-masa kuliah maupun yang baru dikenal, terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan bantuan yang luar biasa. Tanpa kebersamaan kalian, perjalanan ini tidak akan seberarti ini.

Semua pencapaian ini tidak akan pernah terjadi tanpa cinta dan doa dari semua pihak yang telah disebutkan di atas. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan kepada kalian semua.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta.
2. Dra. MC.Chandra Rusmala Dibyorini, M.Si., sebagai Ketua Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta.
3. Aulia Widya Sakina, S.Sos, M.A., sebagai dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, serta saran yang sangat berarti bagi penulis.
4. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga dalam proses pembelajaran selama perkuliahan.

5. Seluruh staf administrasi pada Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam urusan administratif selama perkuliahan dan yang berkaitan dengan tugas akhir.
6. Keluarga, orang tua, dan sahabat-sahabat, atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama perjalanan penulisan skripsi ini. Tanpa kehadiran dan doa dari mereka, penulis tidak akan dapat mencapai tahap ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah yang berarti dalam bidang pembangunan sosial dan menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi dan nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Agustus 2023

Penulis,

Amirullah
NIM. 21510009

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
1. Penelitian Terdahulu	13
2. Konsep <i>Colaborative Governance</i>	16
3. Pengertian Kemandirian.....	42
4. Ekonomi	44
5. Kemandirian Ekonomi	52
6. Pengertian Desa	56
E. Metode Penelitian	57
1. Jenis Penelitian.....	57
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	59

3. Subjek Penelitian	63
4. Lokasi Penelitian.....	65
5. Teknik Pengumpulan Data.....	66
6. Teknik Analisis Data.....	68
7. Triangulasi	72
8. Kendala Pelaksanaan Penelitian	72
BAB II. Deskripsi Wilayah Penelitian	73
A. Sejarah Kalurahan Sendangsari	73
B. Keadaan Geografis	74
1. Luas Wilayah	74
2. Batas Wilayah	74
3. Keadaan Iklim dan Topografi	75
4. Orbitrasi	76
5. Keadaan Demografi	76
C. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kalurahan Sendangsari	82
1. Keadaan Sosial.....	82
2. Keadaan Ekonomi.....	83
3. Keadaan Budaya	87
D. Sarana dan Prasarana Kalurahan Sendangsari	89
1. Prasarana dan Sarana Pendidikan	89
2. Prasarana dan Sarana Kesehatan.....	90
3. Fasilitas Peribadatan	91
4. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Sendangsari.....	92

5. Lembaga Ekonomi	95
E. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sendangsari	98
BAB III. Analisis Data dan Pembahasan.....	99
A. Deskripsi Informan	99
B. Analisis Data dan Pembahasan	100
1. <i>Collaborative Governance</i> untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kalurahan Sendangsari.	100
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam melakukan <i>Collaborative Governance</i> untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kalurahan Sendangsari	168
BAB IV. Penutup.....	177
A. Kesimpulan	177
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA.....	181
LAMPIRAN	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses <i>Governance</i>	22
Gambar 2.I. Model <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell and Gash	33
Gambar 3.I. Kerangka Pikir	60
Gambar 4.I. Teknik Pengumpulan Data	66
Gambar 1.II Peta Administrasi Kalurahan Sendangsari	74
Gambar 2.II Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sendangsari	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.II Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel 2.II Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	77
Tabel 3.II Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	78
Tabel 4.II Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	79
Tabel 5.II Kualitas Penduduk Angkatan Kerja	80
Tabel 6.II Jumlah Penduduk Cacat Mental dan Fisik	81
Tabel 7.II Keadaan Ekonomi Masyarakat Sendangsari	83
Tabel 8.II Keadaan Budaya Kalurahan Sendangsari	87
Tabel 9.II Prasarana Pendidikan	89
Tabel 10.II Prasarana dan Sarana Kesehatan	90
Tabel 11.II Fasilitas Peribadatan di Kalurahan Sendangsari	91
Tabel 12.II Sarana dan Prasarana Kelembagaan	92
Tabel 13.II Kelembagaan Ekonomi	95
Tabel 1.III Daftar Informan	99
Tabel 2.III Daftar Aktor dan Peran Masing-Masing Aktor	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, wacana mewujudkan kemandirian ekonomi bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi sudah tercetus sejak dulu, sejak bangsa ini berdiri, sehingga pemerintah terus-menerus berupaya melanjutkan cita-cita tersebut dengan berbagai kebijakan atau program. Kemandirian ekonomi merupakan suatu kemampuan dimana masyarakat dapat mengatur, memenuhi dan memperoleh barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian ekonomi didefinisikan sebagai bangsa, masyarakat atau keluarga yang memiliki ketahanan finansial terhadap berbagai krisis dan tidak bergantung pada pihak luar (Avillian, 2012). Tujuan dari kemandirian ekonomi adalah agar masyarakat dapat bereproduksi dalam batas-batas kesejahteraan (dirinya sendiri) untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tidak membutuhkan atau bergantung pada orang lain dalam mewujudkan masalah ekonomi.

Dalam rangka mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi, pemerintah telah memformulasi berbagai kebijakan/program, seperti *Pertama*, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini merupakan salah satu yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19 dan juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak Covid-19. Pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 699,43 T (Kemenko Perekonomian, 2021). Menurut Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui Siaran Pers pada acara *Conference Economic dan Business Innovation*

(CEBI), bahwa di tahun 2022 pemerintah mengalokasikan lagi dana sebesar Rp. 455,62 T untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (ekon.go.id, 2022). Program PEN ini memiliki banyak jenis, seperti subsidi bunga/margin, Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, Penjaminan loss limit kredit UMKM, Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM, dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. *Kedua*, Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dibuat untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan masyarakat/UMKM dengan bunga rendah yakni 3%/p.a. *Ketiga*, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Melalui Gernas BBI yang diluncurkan pada tahun 2020, pemerintah berupaya memajukan pelaku usaha/UMKM dengan mendorong *national branding* produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya mewujudkan kemandirian ekonomi. *Keempat*, Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui *ASEAN Online Sale Day (AOSD)* atau Hari Belanja Daring ASEAN yang merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN. AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia (bkpm.go.id, 2022). Selain itu, upaya pemerintah dalam mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi ialah termasuk melalui membuat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sejak undang-undang ini diterbitkan, pemerintah desa didorong dan diberikan kewenangan untuk mewujudkan

kemandirian ekonomi dengan melakukan secara kekeluargaan, musyawarah, partisipasi, kebersamaan, kegotongroyongan, kesetaraan dan berkelanjutan sehingga perekonomiannya tidak lagi bergantung dari faktor eksternal.

Apabila desa sudah mandiri dalam bidang ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, lapangan pekerjaan akan tercipta yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, mempermudah berbagai hal dalam sistem ekonomi, memperbaiki serta meningkatkan pendidikan, memiliki penghasilan yang memadai serta negara menjadi jauh lebih tertata, meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, mempermudah masyarakat dalam membangun semua sektor, meningkatkan kekayaan negara dengan lebih baik lagi serta lebih optimal dari sebelumnya, dan dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk tetap bisa berkembang serta dapat mempengaruhi peningkatan investor asing maupun lokal yang dapat menumbuhkan modal di negara Indonesia. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan Indonesia juga menjadi bangsa yang mandiri. Bangsa yang tidak hanya menjadi "konsumen" dalam pertarungan perdagangan Internasional, terlebih dengan hadirnya pasar bebas, yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa kemandirian ekonomi sangat diperlukan terutama bersumber dari dalam negeri agar Indonesia mampu bertahan apabila terjadi guncangan lingkungan global (Kementerian Kominfo RI. 2019).

Pemerintahan pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten dan desa memiliki komitmen kuat untuk sama-sama membangun Indonesia secara menyeluruh, adil dan merata.

Selaras dengan semangat Nawacita, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian di bidang kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai program pembangunan terus dilaksanakan oleh pemerintahan. Program pembangunan yang telah dan sedang berjalan, telah menunjukkan dampak positif, yakni semakin bertambahnya desa yang masuk kategori maju dan mandiri. Ini terlihat dari laporan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2022. Dari 73.954 desa yang ada di Indonesia, sebanyak 20.249 diantaranya telah masuk kategori maju. Jumlah tersebut naik 32,14% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 15.324 desa. Pertambahan juga terjadi pada desa mandiri, di tahun 2021 hanya 3.278 desa menjadi 6.238 desa di tahun 2022 atau turut bertambah 90,29%. Sementara desa yang berstatus berkembang sebanyak 33.881 desa di tahun 2022, jumlahnya turun 11,04% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 38.086. Sedangkan desa yang kategori tertinggal terdapat 9.221 di tahun 2022. Jumlahnya turun 25,49% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 12.177. Desa yang kategori sangat tertinggal pada tahun 2022 hanya 4.365. Angkanya merosot 12,44% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 4.985 desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa, bahwa di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) dari 392 desa, terdapat 184 desa yang kategori mandiri, yang kategori maju sebanyak 197 desa dan yang berkembang tinggal 11 desa. Sedangkan di Kabupaten Bantul, dari 75 desa

terdapat 10 desa yang masuk kategori maju dan yang mandiri sebanyak 65 desa (Ebook Peringkat IDM 2022: 641-642). Dari 65 desa yang mendapatkan predikat “mandiri” tersebut yaitu termasuk Kalurahan Sendangsari. Menurut data Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tentang peringkat nilai rata-rata indeks desa membangun tahun 2022, bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kalurahan Sendangsari berstatus “mandiri” dengan nilai IDM sebesar 0.8334. Sedangkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0.8334, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0.8334, dan Indeks Ketahanan Lingkungan atau ekologi (IKL) sebesar 0.8334.

Nilai IDM Kalurahan Sendangsari diatas memotret ketepatan intervensi kebijakan pemerintah Sendangsari sehingga dapat meraih predikat “mandiri” yang tahun sebelumnya berstatus “maju” dengan nilai IDM 0.801 (EBook Peringkat IDM, 2021). Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul no. 52 tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, menjelaskan bahwa IDM merupakan Indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial). Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan). Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan). dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi

dan komunikasi). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Sedangkan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Ditetapkannya Sendangsari sebagai Kalurahan “mandiri” menandai adanya perubahan struktur di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan/ekologi, dan sosial. Ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di Sendangsari karena semakin tinggi predikat yang diraih oleh suatu desa, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Bambang mengatakan bahwa desa mandiri ialah desa yang memiliki sumber daya ekonomi sendiri, seperti di sektor pertanian atau sumber ekonomi lainnya dan taraf kemiskinan relatif kecil, serta akses pelayanan dasar sudah tersedia (dalam Budiharjo. 2017: 29). Desa mandiri merupakan status desa tertinggi diantara empat status lainnya, dimana desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah (Marwantho. 2021: 5). Keberhasilan pemerintah Sendangsari dalam menaikkan status kalurahanya dari maju ke mandiri merupakan pencapaian yang membanggakan, dimana Kalurahan Sendangsari mengalami peningkatan status ditengah – tengah merosotnya ekonomi nasional dan global akibat dari pandemi Covid-19.

Namun realitas di lapangan ditemukan bahwa upaya mewujudkan kemandirian ekonomi di Kalurahan Sendangsari masih minim. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya problem, seperti kemiskinan, kesehatan, ketenagakerjaan dll. Berdasarkan hasil *interview* peneliti dengan Sulis Yanto, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Sendangsari saat melakukan pra-penelitian bahwa dari jumlah penduduk Sendangsari sebanyak 12.506 jiwa, yang terdiri dari 4.248 KK terdapat masyarakat yang non sejahtera sebanyak 3.323 orang dan yang sejahtera hanya 806 orang dan 116 orang terdiri dari TNI, POLRI dan PNS. Hal ini didukung dengan adanya ungkapan Carik Sendangsari saat rakor kader MPM (Mekanisme Pemutakhiran Mandiri) untuk membahas masalah kemiskinan dan program pengentasan kemiskinan di Pendopo Jonggring Salaka pada akhir tahun 2021 yang digelar oleh pemerintah Kalurahan Sendangsari, bahwa tingkat kemiskinan di Kalurahan Sendangsari masih tergolong tinggi. Disaat yang sama, Kasi Pelayanan Sendangsari, Bapak Sabari, menyampaikan bahwa untuk membantu permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, termasuk masalah kemiskinan yang masih tinggi, maka pemerintah Kalurahan Sendangsari telah membentuk tim Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) (sendangsari.bantulkab.go.id. 2021).

Banyaknya penduduk Sendangsari yang tergolong miskin dapat juga dilihat dari jumlah peserta penerima PKH. Pada tahun 2020 jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Sendangsari sebanyak 1.181 KK (Kecamatan Pajangan Dalam Angka 2021:45). Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.195 Kepala Keluarga (KK) (Kecamatan Pajangan Dalam Angka 2022:43). Kemiskinan sebenarnya bukan

hanya masalah jumlah penerima PKH atau proporsi penduduk miskin yang menerima bantuan program PKH, tetapi juga dapat dilihat dari permasalahan lain, seperti balita yang mengalami stunting karena persoalan stunting menyangkut dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan penelitian Putri Fatika Sari dan Endah Saptutyningasih pada tahun 2020 tentang *Determinan Willingness to Pay Mitigasi Risiko Stunting* di Kecamatan Pajangan, Bantul, Indonesia bahwa balita yang dinyatakan mengalami stunting di Kelurahan Sendangsari tercatat pada tahun 2018 sebanyak 11,89% balita dan pada tahun 2019 sebanyak 13,23% balita yang mengalami stunting. Temuan tersebut didukung juga dengan adanya pernyataan Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Bantul, Anugrah Wiendyasari, bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Kecamatan Pajangan menjadi wilayah tertinggi angka stuntingnya dibandingkan dengan Kecamatan-kecamatan yang lain. Angka stunting itu tersebar di tiga kalurahan, yakni, Kalurahan Triwidadi, Sendangsari, dan Guwosari (Radar Jogja. 2020). Menurut Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Stunting dapat disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung yang dapat menyebabkan stunting adalah pemberian makanan yang bergizi bagi bayi dan balita, pola pengasuhan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan (puskesmas atau rumah sakit), dan kesehatan lingkungan yang meliputi sanitasi serta sarana air bersih. Sedangkan faktor tidak langsung yang dapat menyebabkan stunting adalah tingkat pendapatan keluarga, kesenjangan ekonomi dan sosial, sistem pangan, jaminan sosial, dan sistem kesehatan (dalam Putri Fatika Sari dan Endah Saptutyningasih. 2020: 23). Hal ini sejalan dengan pandangan

Kementerian Kesehatan, bahwa sebesar 67% penyebab stunting disebabkan karena lingkungan yang tidak sehat, khususnya tingkat air dan sanitasi yang buruk dan sisanya dikarenakan kurangnya asupan gizi yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya (dalam Putri Fatika Sari dan Endah Saptutyningasih. 2020: 23).

Selain dari yang telah diuraikan diatas, hal lain yang dapat menunjukkan minimnya upaya mewujudkan kemandirian ekonomi di Kalurahan Sendangsari ialah rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM), kegiatan industri rumahan sebagian besar masih menggunakan peralatan tradisional/tingkat penguasaan ilmu dan teknologinya rendah, kurangnya informasi/penguasaan pasar, keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha, belum maksimalnya pengelolaan potensi ekonomi desa, dan belum tersedianya lapangan pekerjaan. Fakta-fakta tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Edriana Pangestuti dkk. pada tahun 2018, bahwa ketidakmandirian ekonomi desa disebabkan oleh minimnya akses pasar, kurangnya kreativitas masyarakat, minimnya penguasaan teknologi sehingga berdampak pada kurangnya inovasi produk, dan kurangnya pemanfaatan lahan yang tersedia. Pada tahun 2019, Lina Krisnawati, dkk. melakukan penelitian dan menemukan bahwa faktor kelemahan yang menghambat Desa menjadi desa mandiri secara ekonomi adalah manajemen usaha UKM masih sederhana, tidak ada pengendalian kualitas produk sehingga tidak sesuai dengan standar pasar, teknologi pendukung yang digunakan minim, produktivitas dan efisiensi proses produksi masih rendah, dan belum adanya kepastian pasar. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nurma Sari pada tahun 2019 menemukan bahwa salah satu faktor terpenting menurunnya angka

kemiskinan dan dapat terwujudnya kemandirian ekonomi adalah pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Sumber daya lokal yang dimaksudnya meliputi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya sosial. Pemanfaatan SDM berupa tenaga, skill, pengetahuan, dan atau ide dari masyarakat. Sedangkan SDA yang dimanfaatkan ialah padi/beras, dan air. Sementara pada sumber daya sosial, pemerintah mengoptimalkan dinas-dinas terkait, BUMD, Bulog, Gapoktan, dan menganjurkan kepada PNS untuk membeli produk beras dari petani.

Berhasil tidaknya mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari tergantung pada kerjasama atau keterlibatan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta serta stakeholder lainnya dengan komitmen yang kuat agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud karena untuk mewujudkan kemandirian ekonomi tentu tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, misalnya pemerintah sendiri meskipun anggaran (APBDes) telah tersedia. Menariknya, di Kalurahan Sendangsari terdapat berbagai sarana ekonomi yang berpotensi mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi, seperti 2 unit Bank Umum Pemerintah (*government bank*), 1 (satu) unit Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan organisasi ekonomi yang bersifat sosial yang berfungsi sebagai wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, 1 (satu) unit Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra), dan 3 (tiga) unit Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) yang merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman

(Kecamatan Pajangan dalam angka 2022: 89, 90, dan 91). Selain dari itu, Kalurahan ini juga memiliki BUMDes yang bisa dijadikan sebagai perekonomian masyarakat.

Bertolak dari problematika yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini, tertarik mengangkat judul “*Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul”. Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan kerjasama dari para stakeholder dapat merefleksikan kesiapan pemecahan problem-problem sosial. Artinya *Collaborative governance* diharapkan menjadi suatu jawaban dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial khususnya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan *collaborative governance* untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menjelaskan *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan *collaborative governance* untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara akademik atau teoritis, maupun secara praktis.

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan mengenai mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan juga untuk menjadi landasan atau referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara akademik, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Bagi Peneliti, manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan dan sekaligus menjadi instrumen dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti

kegiatan perkuliahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Bagi pemerintah dan pendamping desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang bisa digunakan dalam “mewujudkan kemandirian ekonomi desa”. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pekerja sosial dan masyarakat dalam melakukan pembangunan perdesaan, lebih khusus yang menyangkut kemandirian ekonomi desa.

D. Kerangka Teori

1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dan juga dapat membantu lancarnya penelitian ini. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik pada penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Huzaini, Dian Herdiana dan Iqbal Miftakhul Mujtahid dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kolaborasi pemerintah terkait pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kabupaten Natuna selama masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kabupaten Natuna sudah berjalan cukup baik dengan dikaji dari beberapa komponen; *starting condition, collaborative process, facilitative leadership dan institutional design*.

Penelitian yang kedua adalah berjudul “*Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*”. Penelitian ini dilakukan oleh Elsa Trisniati, Juliannes Cadith, dan Kandung Sapto Nugroho pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Deskripsi tata kelola kolaboratif bertitik tolak dari model *collaborative governance*, yang menekankan empat dimensi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Metode penelitian bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan, serta data sekunder penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif berdasarkan dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum berjalan optimal. Penelitian ini merekomendasikan bahwa masyarakat meningkatkan sumber daya yang

dimilikinya agar dapat ikut berkolaborasi; pemerintah memberikan pelatihan berkelanjutan untuk membantu masyarakat agar aktif berkolaborasi dan membentuk forum khusus sebagai wadah untuk berkomunikasi dan berdiskusi terkait visi dan misi yang ingin dicapai bersama dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

Penelitian yang ketiga adalah yang dilakukan oleh R. Rindu Garvera, Fahmi Syam Arifin, Anisa Nurul Fazrilah dengan judul “*Collaborative governance* dalam mewujudkan desa mandiri” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses *Collaborative Governance* yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian Desa Bojongmengger, mengetahui apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Bojongmengger dan mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Bojongmengger. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa *Collaborative Governance* dalam mewujudkan kemandirian desa belum berjalan optimal, Adapun untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Bojongmengger yaitu dari Sumber Daya (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Keuangan), serta Otoritas atau Kewenangan. terdapat 3 (tiga) hambatan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* yaitu kurangnya komitmen, keterbatasan informasi serta struktur organisasi yang masih terlihat hirarki atau lebih mendominasi.

Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan Abdul Fatah Fanani, dan Supardi Ibrahim pada tahun 2018 dengan judul “*Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa (Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses collaborative governance dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini adalah *collaborative governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo sudah ada beberapa kegiatan yang mendukung *collaborative governance* dalam mendorong terwujudnya kemandirian desa. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah terbentuknya Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Program Kawasan Perdesaan (PROKADES), Desa Melangkah, dan Startup Desa.

2. Konsep *Collaborative Governance*

a. Pengertian *Collaborative*

Saat ini masih banyak orang yang menyebut istilah kolaborasi (*collaborative*) sama dengan istilah kemitraan (*partnership*), jaringan (*network*), koordinasi (*coordination*), kerja sama (*cooperation*), dan sejenisnya padahal istilah-istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda meskipun terdapat juga bagian persamaannya. Salah satu aspek yang menyamakan istilah-istilah tersebut adalah bahwa seluruhnya menjadi jawaban dari permasalahan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan

pemerintahan yakni adanya dominasi elite pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan adanya kontrol hierarkis sehingga tidak memberikan ruang bagi publik untuk ikut terlibat di dalamnya. Meskipun istilah-istilah tersebut secara umum memiliki makna yang hampir sama, namun penting untuk melihat perbedaan penggunaannya. *Pertama* tentang kemitraan (*partnership*). Secara sederhana kemitraan didefinisikan sebagai kerja sama antara dua organisasi yang mengumpulkan dan menyatukan sumber daya untuk mengejar tujuan bersama, (Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, 2020: 103). Sulistiyani mendefinisikan kemitraan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep kemitraan cenderung sering dipakai dalam urusan-urusan bisnis yang berorientasi keuntungan ekonomi (dalam Maulana M. dan I. Mustofa, 2020: 104).

Kedua, jaringan (*network*) atau lebih dikenal dengan model interorganisasi merupakan pengembangan dari teori tradisional yaitu teori model intraorganisasi. Lebih mendalam lagi, penggunaan istilah jaringan juga digunakan dalam teori implementasi program oleh Cheema dan Rondinelli (dalam Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, 2020: 104), menurut keduanya ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni: (1) kondisi lingkungan; (2) hubungan antar organisasi;

(3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program; serta (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Kemudian dari keempat kelompok variabel tersebut diperluas lagi menjadi beberapa sub yang salah satunya adalah efektivitas jejaring untuk mendukung program. Hal ini menunjukkan pentingnya jejaring atau jaringan dalam sebuah proses kebijakan terutama dalam implementasi kebijakan.

Ketiga, dalam kaitan antara istilah koordinasi (*coordination*), koperasi (*cooperation*), dan kolaborasi (*collaboration*), O'Flynn dan Wanna (dalam Maulana M. dan I. Mustofa, 2020: 104-105) menyebutkan bahwa ketiganya adalah sama-sama merupakan sebuah mekanisme atau langkah menuju tercapainya tujuan dalam sebuah proses transformasi yang diawali dengan koordinasi menuju koperasi (kerjasama) untuk terbangunnya kolaborasi. Ketiganya merupakan istilah yang dipakai untuk membedakan dengan istilah perintah. O'Flynn and Wanna (2008: 20) menjelaskan bahwa makna dari istilah *command* (perintah) sebagai proses kontrol terpusat dengan garis wewenang hierarkis, selanjutnya berproses dan bertransformasi ke dalam istilah *coordination* (koordinasi) bermakna pada adanya proses pengambilan keputusan kolektif dan dikenakan pada lembaga yang berpartisipasi, *cooperation* (kerjasama) berarti proses berbagi ide dan sumber daya untuk saling menguntungkan, dan terakhir *collaboration* (kolaborasi) dimaknai sebagai proses penciptaan (tujuan) bersama yang ditengahi atau difasilitasi oleh institusi/lembaga yang otonom.

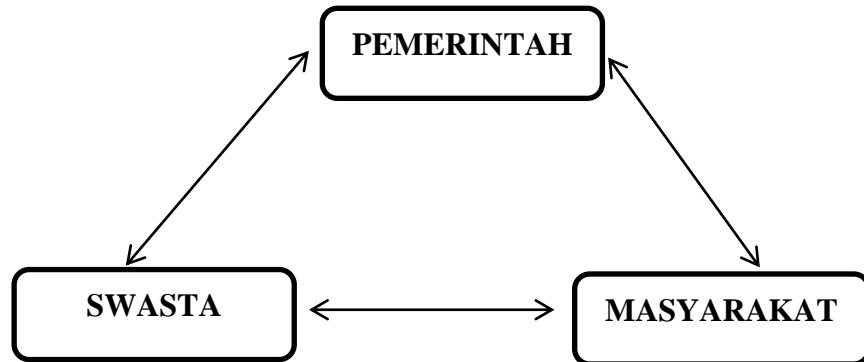
Istilah koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi sama-sama merupakan mekanisme pengambilan keputusan dan tujuan serta *sharing* (berbagi) secara bersama antar aktor. Meski demikian, untuk menekankan adanya peran pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan serta otonom dalam melakukan fasilitasi, maka istilah kolaborasi (*collaboration*) lebih tepat dipakai jika dikaitkan tata kelola pemerintahan, muncullah kemudian istilah *collaborative governance* (Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, 2020: 104-105).

Selain proses transformasi kolaborasi sebagaimana diuraikan diatas, pakar lain menyebut fenomena kolaborasi dengan istilah kemitraan (*partnership*). Bovaird dikutip oleh Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, (2020: 106) mendefinisikan kemitraan sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak antara organisasi publik dengan organisasi di luar sektor publik. Demikian juga Munro (dalam Maulana M. dan I. Mustofa, 2020: 106) melihat *partnership* sebagai bentuk kerja sama antara pemimpin masyarakat dengan manajer publik untuk efektifitas demokrasi. Dari kedua pendekatan tersebut (*collaboration dan partnership*) pada prakteknya sangat sulit untuk dibedakan sehingga secara umum Cooper menyebutnya sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis atau bertumpu pada peran warga negara (dalam Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, 2020: 106).

Meskipun Bovaird dan Munro menyebut kolaborasi sebagai kemitraan, namun sebenarnya kedua konsep tersebut mempunyai perbedaan cukup mendasar. Konsep kemitraan berbeda dengan kolaborasi, karena kolaborasi mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan kemitraan (Maulana M. dan I. Mustofa, 2020: 106). Menurut Wildavsky, bahwa kolaborasi melibatkan beberapa dimensi yang berbeda. *Pertama*, kolaborasi bisa melibatkan kerja sama untuk membangun kesamaan, meningkatkan konsistensi, dan menyelaraskan kegiatan antara aktor-aktor. *Kedua*, kolaborasi dapat menjadi proses negosiasi yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi dan membentuk *trade-off*. *Ketiga*. Kolaborasi dapat melibatkan peran pengawasan, pemeriksaan, penarikan keputusan bersama-sama dan koordinasi secara terpusat dalam forum, (dalam Maulana M. dan I. Mustofa, 2020: 106). Perbedaan *keempat* adalah bahwa kolaborasi dapat melibatkan kekuasaan dan pemaksaan, kemampuan untuk memaksakan hasil atau memaksakan preferensi sendiri kepada yang lain, sampai batas tertentu, dengan kepatuhan atau keterlibatan mereka. *Kelima*, kolaborasi dapat melibatkan komitmen dan niat masa depan, kemungkinan berperilaku, perencanaan atau persiapan untuk menyelaraskan kegiatan. *Keenam*, kolaborasi dapat menumbuhkan keterlibatan, pengembangan motivasi internal, dan komitmen pribadi untuk kegiatan, keputusan, tujuan organisasi atau tujuan yang lebih strategis (Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, 2020: 104-105).

b. Pengertian *Governance*

Dalam mempermudah peneliti maupun pembaca dalam memahami *collaborative governance*, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang istilah *governance* karena istilah ini (*governance*) menjadi dasar dari konsep *collaborative governance*. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “*governance*” dan “*government*” sangat familiar dan kedua istilah tersebut hampir serupa, namun memiliki makna yang berbeda. Ulum dan Ngindana (2017:6) mengemukakan bahwa *governance* merupakan diseminasi otoritas dari *single actor* menjadi *multi-aktor*. Konsep *governance* di bagi menjadi beberapa urusan publik yang sebelumnya telah dikelola oleh aktor tunggal yaitu pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor lain seperti dari sektor swasta dan masyarakat. Konsep *governance* bisa dikatakan sebagai pelaksanaan demokrasi karena pemerintah tidak lagi dominan dalam menyelenggarakan urusan-urusan publik. Dalam proses *governance* terdapat beberapa aktor yang berpengaruh, yang dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 1.I. Proses *Governance*

Sumber: Abidin (dalam Rindu Garvera, Fahmi Syam Arifin, dan Anisa Nurul Fazrilah, 2021: 505).

Dalam proses *governance* terdapat 3 (tiga) aktor, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling bekerjasama dalam proses penyelenggaraan urusan-urusan publik, tanpa saling mendominasi. Dalam konteks ini, pemerintah tidak menjadi aktor tunggal dalam memonopoli penyelenggaraan disetiap urusan-urusan publik, melainkan memerlukan bantuan dari aktor atau pihak lain. Dalam peranannya pemerintah memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar tetap stabil sehingga proses bernegara dapat berjalan dengan baik. Sedangkan swasta dengan kekuatan yang dimilikinya berperan dalam menciptakan dan meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, serta peranan lainnya yang dapat membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

urusan publik. Sementara masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan berkewajiban mengambil andil untuk mensukseskan program pemerintah, mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap evaluasi. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena pada dasarnya keberhasilan suatu pembangunan terletak pada tingkat partisipasi masyarakat setempat.

c. Pengertian *Collaborative Governance*

Istilah *Collaborative Governance* sering digunakan oleh para ahli dengan istilah yang berbeda-beda, namun tetap dalam pengertian atau makna yang sama, misalnya *collaborative*, *participatory management*, *participatory governance*, *collaborative democracy*, *collaborative governance*, *sound governance* dan *collaborative management* untuk menggambarkan upaya bersama stakeholder dan *non-state* dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan bersama dan implementasi (La Ode Syaiful, 2018: 1).

Ansell dan Gash menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, *collaborative governance* merupakan sebuah kebutuhan pemerintah untuk memformalkan keterlibatan para pihak di luar pemerintah. Dalam definisi di atas, terdapat beberapa kata

kunci yang menekankan pada enam karakteristik atau kriteria *collaborative governance*, (Ansell and Gash, 2007:544) antara lain:

- 1) Forum di inisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik.
- 2) Peserta di dalam forum harus mencakup aktor *non-state*.
- 3) Peserta harus terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan (tidak hanya berkonsultasi).
- 4) Forum diselenggarakan secara resmi/terorganisir secara formal.
- 5) Forum diselenggarakan dengan tujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama atau dengan kata lain kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus.
- 6) Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen pelayanan publik.

Penekannya adalah forum tersebut terorganisasi secara resmi dan melakukan pertemuan secara teratur, yang terdiri dari lembaga publik, swasta, *non-state*, termasuk didalamnya masyarakat umum yang secara langsung terlibat dalam keputusan (bukan hanya berkonsultasi), (La Ode Syaiful, 2018: 2).

Henton (dalam Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, 2020: 110-111) mengemukakan *collaborative governance* dengan tiga karakteristik, yaitu:

- 1) *Forum for public deliberation*.

Karakteristik ini merupakan forum di mana terdapat keterlibatan berbagai pihak yang secara interaktif melakukan diskusi dari berbagai

perspektif, perubahan pola pikir sehingga saling mendapatkan pemahaman untuk mendapatkan rekomendasi kolektif yang akan dilaksanakan oleh agen publik.

2) *Community problem solving.*

Karakteristik yang kedua ini merupakan *interorganizational collaboration* terdiri dari komunitas, pemerintah, dan swasta dalam periode yang berlangsung lama, untuk mengatasi permasalahan bersama.

3) *Multistakeholders dispute resolution.*

Karakteristik yang terakhir ini adalah dimana terdapat resolusi konflik dengan membawa pihak-pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing. Resolusi tersebut dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau konsensus dengan berfokus pada upaya mencapai kesepakatan.

Robertson dan Choi (dalam Maulana M. dan I. Mustofa, 2020: 111-112) juga mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian di mana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas penting dan kedudukan serta kesempatan yang sama, baik untuk merefleksikan aspirasinya maupun dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Menurut R. Rindu Garvera, Fachmi Syam Arifin, dan Anisa Nurul Fazrilah (2021:505), *Collaborative governance* merupakan konsep dalam suatu manajemen pemerintahan yang dijadikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat,

maupun swasta yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara bersama dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Thomson dan Perry, 2006 (dalam La Ode Syaiful, 2018: 2) mengemukakan, *Collaborative governance* merupakan sebagai salah satu cara untuk memecahkan konflik atau masalah sosial lainnya yang kronis antara pemangku kepentingan yang beragam, merumuskan rencana pembangunan untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui *self*-organisasi antar pemangku kepentingan yang kreatif, deliberatif, dan saling menguntungkan. Dalam *collaborative governance*, peserta dan pemerintah sebagai aktor sosial diperlakukan sama dan otonom, Booher 2004 (dalam La Ode Syaiful, 2018: 2), dan keputusan kolektif yang dibuat bukan dengan suara terbanyak tetapi melalui konsensus, Chamber, 2003 (dalam La Ode Syaiful, 2018: 2). Gray (1989), Bingham and O’Leary (2008), Farazmand (2004), Huxham dan Vangen (2000), mendefinisikan bahwa *Collaborative governance* adalah jenis *governance* yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan dan *non-state* untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi (dalam La Ode Syaiful, 2018: 3).

Sementara, Dwiyanto menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, dan strategi, serta aktivitas antara pihak. Mereka (para pihak) memang berdiri masing-masing, namun memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk

pada kesepakatan bersama (dalam Maulana M. dan I. Mustofa, 2020: 112). Sejalan dengan definisi tersebut, Sink menjelaskan bahwa kolaboratif ialah sebagai proses di mana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu kolaborasi berarti juga pilihan strategi untuk mempercepat tercapainya kepentingan atau tujuan (dalam Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, 2020: 111-112).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan setiap problematika atau isu tertentu secara bersama-sama dengan melibatkan multi aktor. Aktor-aktor (para pihak) tersebut tidak hanya instansi pemerintah dan non pemerintah, melainkan masyarakat sipil juga termasuk di dalamnya ialah *private sector*. Kolaborasi itu dilakukan atas dasar kesadaran terhadap keterbatasan kapasitas, keterbatasan sumber daya (manusia dan dana), maupun keterbatasan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang akan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan atau program. Dalam merumuskan tujuan, visi-misi, norma, kebijakan atau program masing-masing pihak memiliki kedudukan dan kewenangan yang setara. Dalam melakukan kolaborasi tidak hanya berdasarkan pada keinginan atau kebutuhan pemerintah semata, namun dapat pula diinisiasi atau dilakukan oleh pihak

lain, seperti organisasi privat, organisasi sipil, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

d. Alasan/Tujuan Penerapan *Collaborative Governance*.

Dalam melakukan suatu pembangunan *collaborative governance* sangat diperlukan atas dasar landasan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pemerintah tidak mungkin bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal, jika hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki, termasuk dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya, maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan *collaborative* dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil, sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut. Secara eksternal, terdapat fakta bahwa lingkungan kebijakan senantiasa berubah dan bergeser. Perubahan atau pergeseran tersebut bisa dalam bentuk isu yang semakin meluas ke arah yang di luar normal, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas yang dimiliki oleh aktor di luar pemerintah yang semakin besar, serta respon atau inisiatif masyarakat yang semakin meluas. Atas dasar kedua fakta empirik (internal dan eksternal) itu, konsep *collaborative governance* kemudian muncul sebagai respon pemerintah atas kesadaran akan kapasitas atau kemampuan internal yang

dimiliki dan perubahan atau pergeseran lingkungan eksternal yang dihadapi, (Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, 2020: 108).

Menurut Siti Waliah, et al. 2022: 134) bahwa *collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik.

Pandangan-pandangan di atas, selaras dengan yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007: 544) *collaborative governance* muncul sebagai respon kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan dan politisasi regulasi. Ini dikembangkan sebagai sebuah alternatif adversarialism untuk pluralisme kelompok kepentingan dan kegagalan akuntabilitas manajerialisme (terutama otoritas ahli yang ditantang). Lebih lanjut Ansell dan Gash menyatakan bahwa *collaborative governance* muncul secara adaptif atau sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut: (1) kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan (3) upaya untuk mencari cara-cara baru untuk mendapatkan legitimasi politik dari sebuah kebijakan, (dalam Maulana Mukhlis dan Imam Mustofa, 2020: 109), (4) kegagalan implementasi kebijakan di lapangan, (5) Ketidakmampuan dari kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh rezim-rezim kekuasaan dalam memanfaatkan institusi lainnya untuk menghambat keputusan yang diambil, (6) mobilisasi kelompok

kepentingan, dan (7) tingginya biaya dan politisasi regulasi, Ansell dan Grash (dalam Siti Waliah, et al. 2022: 136).

Pendapat diatas menunjukkan bahwa kolaborasi dilakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi juga dianggap muncul akibat beragamnya kepentingan antar tiap kelompok sehingga memunculkan adanya suatu kolaborasi. Dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi atas buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain itu, kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan, (Siti Waliah, et al. 2022: 136).

e. Prinsip *Collaborative Governance*

Untuk memudahkan, membangun pemahaman secara taksonomik, prinsip *collaborative governance* dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Kebijakan publik untuk pembangunan umum, yakni untuk mengadakan sesuatu yang sebelumnya ada dan untuk kebutuhan umum atau semua warga, bukan untuk beberapa warga secara khusus. Kebijakan publik untuk pembangunan umum atau disebut sebagai “pembangunan” dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pembangunan fisik dan non fisik. (2) Pelayanan publik, yaitu pelayanan kepada semua warga secara sama atau setara. Pelayanan publik atau disebut sebagai “pelayanan” dapat

dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pelayanan kewargaan, pelayanan dasar dan pelayanan non dasar, (Siti Waliah, et al. 2022: 107)

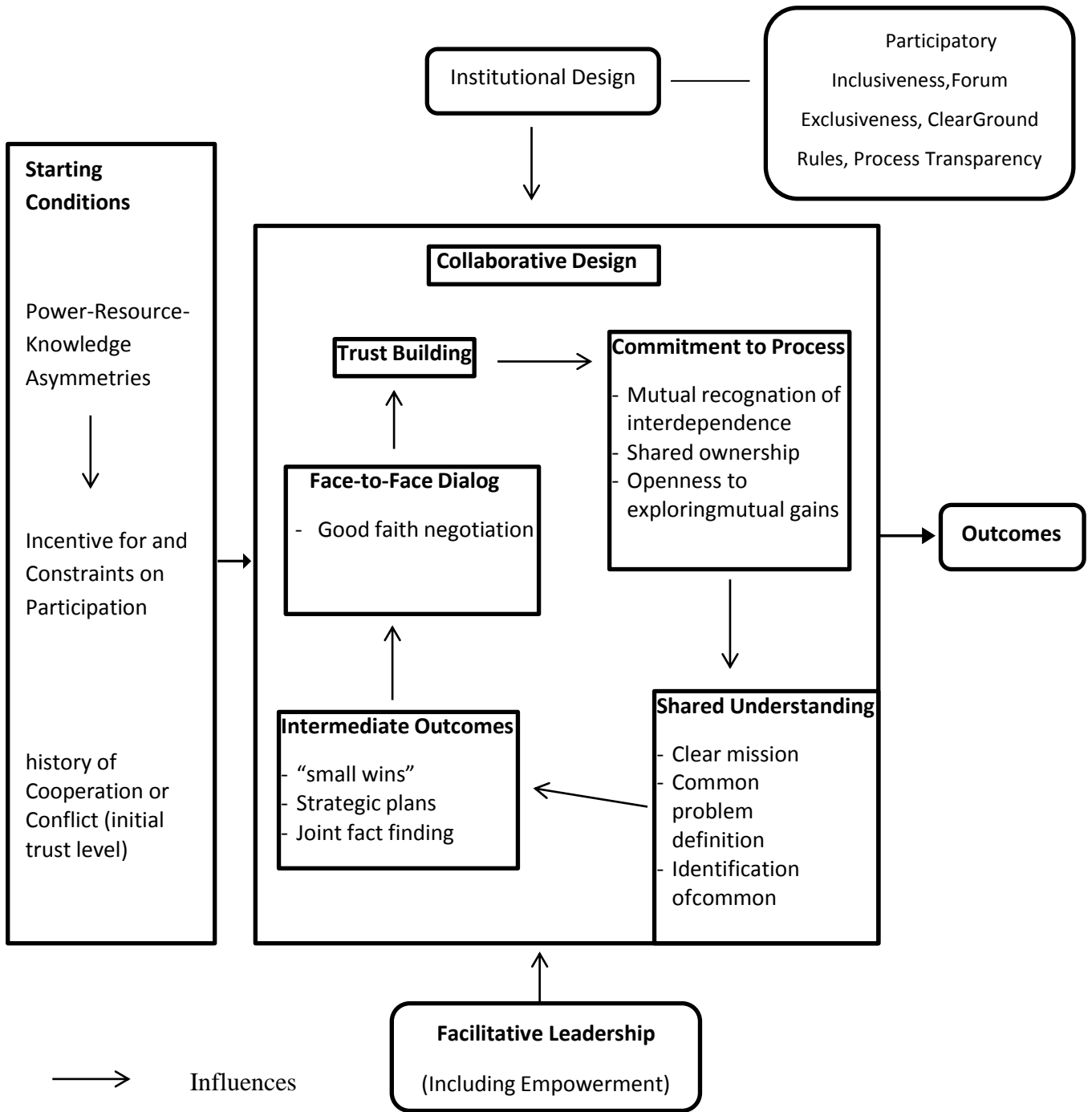
Menurut Seigler (dalam Siti Waliah, et al. 2022: 137), bahwa ada 8 (delapan) prinsip utama dalam penerapan *collaborative governance*, yaitu:

- 1) Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik.
- 2) Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik.
- 3) Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk memberdayakan masyarakat.
- 4) Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik.
- 5) Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan.
- 6) Kebijakan harus strategis.
- 7) Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik.
- 8) Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.

f. Model *Collaborative Governance*

Aspek lain yang penting dalam kajian *collaborative governance* adalah model atau desain *collaborative governance* yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat bagaimana proses *collaborative governance* berlangsung atau dijalankan. Beberapa ilmuan telah merumuskan model *collaborative governance*, salah satunya seperti model yang dikembangkan oleh Ansell and

Gash. Model ini terdiri dari kondisi awal (*starting condition*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*) sebagai inti dari tata kelola kolaboratif itu sendiri, (dalam Maulana Mukhlis & Imam Mustofa, 2020: 121). Model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash ini mengacu pada strategi formal untuk menggabungkan pemangku kepentingan dalam sebuah kolaborasi, yang bertujuan mencapai sebuah konsensus di antara para pemangku kepentingan yang ada, (Oswar Mungkasa, 2022: 43).



Gambar 2.I Model Collaborative Governance menurut Ansell and Gash

Sumber: Ansell and Gash (dalam Retno Sunu Astuti Hardi Warsono Abd. Rachim (2020: 76).

1) Kondisi Awal (*Starting Conditions*).

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholders*, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Bentuk ketidakselarasan tersebut dapat terjadi antara lain seperti *distrust*, sikap tidak saling menghormati, antagonisme antar aktor atau adanya pertentangan. Menurut (Ansell and Gash, 2007: 551), dalam tahap ini terdapat tiga variabel penting, yakni ketidakseimbangan sumber daya antar *stakeholders*, sejarah atau pengalaman konflik atau kerja sama yang pernah muncul antar *stakeholder* dan insentif.

a) Keseimbangan antara sumber daya dan kekuatan.

Keseimbangan sumber daya dan kekuatan dapat terjadi ketika aktor-aktor memiliki kapasitas organisasi atau sumber daya untuk berpartisipasi maupun kesempatan partisipasi yang setara dengan *stakeholders* lain. Hal tersebut akan memunculkan kondisi yang lebih positif apabila aktor penting juga memiliki infrastruktur organisasi yang representatif untuk menjalankan *collaborative governance*. Relasi antar *stakeholders* tersebut dapat dilaksanakan secara efektif ketika masing-masing aktor memiliki komitmen untuk melakukan strategi positif pemberdayaan dari para *stakeholders* yang paling memiliki kekuatan kepada *stakeholders* lainnya yang lebih lemah. Pencederaan terhadap aspek keseimbangan sumber daya dan

kekuatan ini adalah berupa terjadinya ketidakseimbangan yang berpotensi mengganggu hasil kolaborasi.

b) Insentif

Ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antar *stakeholders*, maka akan berdampak pada eksklusifitas antar aktor sehingga mempengaruhi komitmen dan dorongan untuk berpartisipasi. Semakin terdapat saling ketergantungan antar *stakeholders*, maka akan semakin meningkatkan partisipasi. Oleh karena itu, insentif yang diberikan kepada para pihak yang berkolaborasi perlu ditetapkan sehingga kesediaan para pihak untuk berkolaborasi tetap dapat terbangun.

c) *Pre-history* dalam bentuk pengalaman kerja sama atau konflik.

Ketika masing-masing *stakeholders* memiliki kapasitas relasi yang tinggi, maka akan memunculkan intensitas konflik yang tinggi sehingga mampu menciptakan dorongan yang kuat untuk berkolaborasi. Konflik menjadi sebuah indikasi bahwa masing-masing *stakeholders* memiliki kesadaran dan komitmen dalam berkolaborasi. Komitmen tersebut harus dibarengi dengan sifat saling percaya dan interdependensi sehingga konflik akan menghasilkan sesuatu yang konstruktif untuk menguatkan kolaborasi. Ajakan tentang siapa yang bisa berkolaborasi dan siapa yang tidak berkolaborasi salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana

pengalaman para pihak tersebut selama ini dalam hal kerja sama. Pilihan kepada pihak yang selama ini cenderung berkonflik dalam kerja sama menjadi salah satu tantangan terhadap keberhasilan kolaborasi yang akan dibangun.

2) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*).

Kepemimpinan fasilitatif memegang peranan penting dalam proses *collaborative governance*. Urgensinya adalah membawa para *stakeholders* untuk terlibat dalam melakukan kolaborasi, menetapkan aturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan menganalisa keuntungan bersama. Selain itu, Lasker dan Weis (dalam Ansell and Gash, 2007:12) mengemukakan bahwa kepemimpinan kolaboratif yang ideal harus memiliki keterampilan berupa (1) mempromosikan secara luas dan aktif tentang partisipasi, (2) memastikan pengaruh dan kontrol secara luas, (3) memfasilitasi produktivitas kelompok atau aktor, dan (4) mampu memperluas cakupan proses. Ketika tidak terdapat relasi yang bersifat simetris antara pemerintah dengan non-pemerintah, maka harus dimunculkan pimpinan ‘organik’ yang berasal dari *stakeholders* lain.

Sementara Ryan dalam Ansell and Gash mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a) Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi
- b) Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis

- c) Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

3) Desain Institusional (*Institutional Design*).

Ansell dan Gash (dalam Maulana Mukhlis & Imam Mustofa, 2020: 124) mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada aturan-aturan dasar yang mengatur *collaborative governance*, dalam pengertian adanya legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif sehingga memungkinkan semua aktor/kelompok dapat berpartisipasi. Keterbukaan dan atau inklusivitas tersebut dilakukan agar semua kelompok merasa memiliki kesempatan yang sah dan sama untuk berpartisipasi dalam mengembangkan komitmen secara bersama. De Save (dalam Syamsul Arifin dan Utami Dewi, 2018: 324) berpendapat bahwa salah satu indikator keberhasilan dari *collaborative governance* adalah adanya kepastian *governance* atau kejelasan dalam tata kelola yang meliputi kejelasan siapa saja anggota dalam *collaborative governance*, aturan-aturan yang mendasari jalannya program dan yang menentukan berjalannya kolaborasi.

Jantung dari proses legitimasi harus berdasarkan pada (1) kesempatan bagi setiap aktor untuk berkomunikasi dengan *stakeholders* lain tentang hasil-hasil kebijakan, (2) klaim bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus oleh seluruh aktor. Ketika terdapat aktor yang

sebenarnya terkait dengan isu yang diwacanakan tetapi aktor tersebut tidak memiliki kesesuaian atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat maka pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat yang eksklusif tanpa harus ada keterlibatan aktor lain secara inklusif. Isu desain institusional harus menampilkan urutan waktu yang terstruktur sampai kapan kolaborasi tersebut dijalankan.

4) Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*).

Ansel and Gash (dalam Rahmawati, 2016: 41), menyatakan bahwa proses kolaborasi lebih digambarkan sebagai sebuah siklus dari pada sebuah proses yang bertahap. Sebagai sebuah siklus, sub komponen dalam proses kolaborasi saling mempengaruhi satu sama lain. Proses kolaborasi ini terdiri atas beberapa komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*share understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

a) Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)

Proses *collaborative governance* diawali dari dialog tatap muka antar aktor/*stakeholder*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, memunculkan kesempatan bagi setiap aktor untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama. Dialog

tatap muka dilakukan sebagai media negosiasi untuk memecah kecurigaan antar aktor dalam membangun sebuah kolaborasi karena yang ditekankan pada tahap awal adalah bagaimana membangun konsensus bukan untuk mengatur keuntungan masing-masing aktor. Dialog tatap muka merupakan proses membangun rasa saling percaya, sikap saling menghormati, sikap saling memahami, dan komitmen pada proses.

b) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Ansell dan Gash (dalam Maulana Mukhlis & Imam Mustofa, 2020: 126) menyatakan, proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan antar aktor. *Trust building* menjadi satu fase yang dilakukan untuk membentuk proses saling memahami antar *stakeholders* agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi. De save (dalam Syamsul Arifin dan Utami Dewi, 2018: 325) mengungkapkan, kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dalam menentukan keberhasilan proses kolaborasi. Kepercayaan dapat berupa informasi-informasi atau usaha dari *stakeholder* lainnya untuk mencapai tujuan dari adanya *collaborative governance*.

c) Komitmen Terhadap Proses (*Commitment To Process*).

Margeum (dalam Syamsul Arifin dan Utami Dewi, 2018: 325) mengungkapkan bahwa tingkat komitmen dari pemangku

kepentingan dalam *collaborative governance* adalah faktor penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan penerapan *collaborative governance*. *Commitment to process* dapat dicapai melalui saling pengakuan, kepemilikan terhadap proses, dan keuntungan yang diperoleh melalui proses kolaborasi. Maulana Mukhlis & Imam Mustofa, (2020: 126) menjelaskan, komitmen terhadap proses kolaborasi adalah variabel utama dalam menentukan sukses atau tidaknya kolaborasi. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik demi keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Komitmen bergantung pada kepercayaan dan kemauan dari aktor-aktor untuk saling menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain. Maulana & Imam menambahkan bahwa rasa kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. Rasa kepemilikan terhadap proses berimplikasi pada munculnya rasa saling bertanggung jawab terhadap proses.

d) Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Ansell and Gash menjelaskan, dalam proses kolaboratif, semua *stakeholder* harus mengembangkan pemahaman bersama tentang visi, misi, tujuan dan strategis dari program atau kebijakan yang ingin dicapai secara kolektif, (dalam Syamsul Arifin dan Utami Dewi, 2018: 326). Maulana Mukhlis & Imam Mustofa, (2020: 127),

mengemukakan juga bahwa pada proses kolaborasi, aktor-aktor harus mengembangkan sikap saling memahami terhadap apa yang akan dicapai bersama. Pemahaman bersama juga bisa dimanifestasikan pada kesepakatan, pada pendefinisian masalah, atau kesepakatan tentang pengetahuan/teori yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Pengembangan pemahaman bersama dapat dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran. *Sharing understanding* dapat dilakukan melalui kejelasan misi (*clear mission*), pendefinisian masalah bersama (*common problem definition*), dan pengidentifikasian nilai-nilai umum (*identification of common value*).

e) Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*).

Kolaborasi dapat dikatakan konkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan dari proses kolaborasi tersebut. Meskipun hasil sementara ini akan menampilkan output atau keluaran nyata akan tetapi proses *outcomes* tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses. Proses *intermediate outcomes* ini tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir karena hanya merupakan tujuan antara sebagai bukti bahwa konsensus yang disepakati telah tercapai dengan tetap berpikir dalam tercapainya tujuan jangka panjang.

3. Pengertian Kemandirian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian diartikan sebagai sesuatu atau keadaan dimana seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan Monks (1993:80) mengemukakan bahwa kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Sementara Parker (2006: 66) mengartikan kemandirian sebagai kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan dalam mengambil resiko dan memecahkan masalah. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri. Dalam asas pengaturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Menurut HC. Subiakto Tjakrawerdya, kemandirian bukan diartikan hanya bekerja sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Kemandirian itu merupakan suatu paradigma dan praktek dimana terjadi semakin kecil kebergantungan, namun semakin besar saling kebergantungan. Maksud dari mengurangi ketergantungan disini ialah terutama kemandirian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari pihak

pemodal besar, kaum kapitalis, rentenir, yang seringkali mengarah kepada praktek penguasaan sumber daya, sehingga tenaga kerja lokal terjebak hanya sebagai buruh, bukan aktor yang bisa secara kreatif memberdayakan sumber daya lokal yang dimiliki. Semakin mengurangi ketergantungan, dan semakin bisa meningkatkan saling ketergantungan, maka semakin mandiri suatu entitas, individu ataupun suatu usaha. Hal ini juga sesuai dengan konteks kemandirian dalam perspektif Ekonomi Biru, yaitu memperkecil ketergantungan, namun memperbesar saling ketergantungan, dengan perilaku yang kreatif dan proaktif. Pendekatan ini (Ekonomi Biru) lebih banyak melibatkan inisiatif dan kerja bersama masyarakat komunitas lokal, sehingga praktek memperkuat saling ketergantungan merupakan hal yang esensial.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian (Syam Surya, 2018: 205). Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantang-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya. Karena itu, ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan per kapita, tetapi lebih mendasar lagi, yaitu menyangkut manusianya, sebab manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya lain

yang akan dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan (Kartasasmita, G. dalam Syam Surya, 2018: 206).

Pengertian kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa atas kemampuan produksi nasional oleh anak bangsanya sendiri, sehingga menghasilkan kemandirian finansial dengan mengurangi ketergantungan pada pihak lain (Didin S. Damanhuri, 2020). Selain dari beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas, ada juga yang mengatakan bahwa kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai suatu tujuan atau harapan tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan (Ma'soem University. 2020).

4. Ekonomi

a. Pengertian Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Aspek ekonomi ini menyebabkan adanya transaksi antar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tidak hanya kehidupan sehari-hari pada individu, ekonomi juga melibatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam praktik kesehariannya. Dalam penggunaannya di masa sekarang, istilah ekonomi memiliki beberapa makna. Pertama, istilah ekonomi kadang digunakan untuk merujuk pada cara melakukan tindakan, seperti misalnya pada kata *economically* (bertindak secara hemat). Dalam artian ini, ekonomi berarti efisiensi, pengerahan upaya

minimal (dengan hasil maksimal) dan adanya adaptasi terhadap cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kedua, istilah ekonomi kadang juga digunakan untuk merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan atau diinginkan (misalnya dalam produksi). Makna ini sering kali disampaikan dengan istilah *provisioning* (yaitu pengadaan barang dan jasa). Ketiga, istilah ekonomi adalah merujuk pada institusi-institusi dalam pasar adalah perwujudan yang paling mencolok dari upaya pencapaian efisiensi dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan kita.

Secara umum (Muthmainnah, 2021) memaknai bahwa ekonomi adalah segala upaya dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai suatu tingkat kemakmurannya. Cara untuk memenuhi kebutuhan setiap individu itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Sumber daya tersebut dapat diolah menjadi suatu barang yang memiliki nilai lebih kemudian didistribusikan untuk dinikmati oleh masyarakat. Abraham Maslow (dalam Muthmainnah, 2021) mengutarakan bahwa ekonomi merupakan suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan manusia melalui seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Paul Anthony Samuelson juga menyebutkan bahwa ekonomi adalah salah satu cara yang digunakan oleh seseorang atau masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas

untuk memperoleh berbagai macam komoditi dan produk serta mendistribusikannya pada masyarakat supaya dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat umum. Sedangkan Amwal menyebutkan dalam teori ekonominya bahwa ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang cara menentukan suatu keputusan yang efektif untuk mengelola semua sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan pada individu atau masyarakat umum. Lipsey menerangkan bahwa ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan segala sumber daya yang langka untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Menurut Case dan Fair bahwa pengertian ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu atau masyarakat mengambil pilihan untuk menggunakan segala sumber daya yang lengkap terhadap apa yang sudah disediakan oleh alam dan generasi yang sudah ada di zaman sebelumnya. Sementara M. Manullang dalam (Muthmainnah, 2021) mendefinisikan ekonomi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang aktivitas masyarakat dalam upaya untuk mencapai segala kemakmurannya, di mana kemakmuran tersebut adalah suatu keadaan saat manusia dapat memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa.

b. Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorangpun dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ada kerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kerja sama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan, dan seterusnya (Muhammad Idris, 2021). Dengan pengertian yang sama juga (Nur Jamal Sha'id, 2022) mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Bentuk-Bentuk Kegiatan Ekonomi

Menurut (Muhammad Choirul Anwar, 2022) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia terdiri dari tiga bentuk, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Berdasarkan pengertian ekonomi, kegiatan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Produksi setidaknya mencakup dua hal, yaitu menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa serta menambah guna barang dan jasa. Kelompok atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Dengan kata lain, produsen adalah pihak yang melakukan usaha untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Contoh kegiatan

produksi adalah seperti menanam padi (menghasilkan), mengambil ikan dari laut (menambah guna tempat), dan menjahit kain menjadi celana (menambah guna bentuk).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, distribusi merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi, yang terkait juga dengan produksi dan konsumsi. Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Adapun orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi secara sederhana adalah ketika pedagang beras menjual dagangannya di pasar.

Sedangkan konsumsi adalah kegiatan manusia untuk menggunakan, baik barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Sejalan dengan itu, yang disebut sebagai konsumen bukan hanya berlaku untuk seseorang secara tunggal, tetapi juga berupa kelompok. Contoh kegiatan konsumsi yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membeli pakaian karena ingin menjaga tubuh, menjauhkan rasa malu, dan ingin memperoleh kepuasan.

Menurut (Muhammad Idris, 2021) jenis atau bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi tiga kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan

konsumsi. Selanjutnya Idris menjelaskan bahwa Orang atau pihak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah pelaku ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi lima, yaitu rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara. Di antara para pelaku tersebut, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Bisa dikatakan bahwa kegiatan ekonomi adalah bukan hanya menyangkut tentang individu saja, tetapi menyangkut banyak hal termasuk menjaga roda perekonomian. Oleh sebab itu, orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi harus saling menjaga supaya setiap anggota masyarakat bisa hidup sejahtera. Ada jenis kegiatan ekonomi yaitu:

1) Produksi

Produksi dalam kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Contoh kegiatan ekonomi dalam produksi seperti menanam padi, mengambil ikan dari laut, menjahit kain menjadi celana. Jadi, produksi dalam kegiatan ekonomi adalah mencakup dua hal, yaitu menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, dan menambah guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Dalam melakukan kegiatan produksi memiliki beberapa tujuan dan faktor. Adapun tujuan dari produksi, yaitu:

- a) Memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen.
- b) Mencari keuntungan atau laba.

- c) Menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
- d) Meningkatkan mutu dan jumlah produksi.
- e) Mengganti barang-barang yang habis dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam.

Sedangkan tujuan produksi menurut (Nurjamal Sha'id, 2022) adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam usaha mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai bila konsumen memiliki daya beli yang cukup tinggi dan barang atau jasa yang diperlukan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, tujuan dari produksi itu tidak hanya mencakup lima hal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, namun memuat juga tentang menghasilkan barang setengah jadi menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara.

Sementara faktor dari produksi adalah terdiri dari:

- a) Faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam, meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lain.
- b) Faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia.
- c) Faktor produksi modal, yaitu semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain.

- d) Faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola suatu usaha.

2) Distribusi

Distribusi dalam kegiatan ekonomi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan ekonomi distribusi adalah pedagang sate menjual dagangannya di pasar. Kegiatan distribusi bertujuan; (1) Kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. (2) Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen dan (3) Konsumen dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan mudah.

3) Konsumsi

Konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-berangsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Misalnya membeli pakaian karena ingin menjaga tubuh, menjauhkan rasa malu, dan ingin memperoleh kepuasan. Adapun tujuan konsumsi adalah:

- a) Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap.
- b) Menghabiskan nilai guna barang sekaligus.

- c) Memuaskan kebutuhan secara fisik.
- d) Memuaskan kebutuhan rohani.

5. Kemandirian Ekonomi

a. Pengertian Kemandirian Ekonomi

Konsep *economic self sufficiency*/kemandirian ekonomi sering menjadi bagian dari konsep ekonomi politik yang masih diyakini dan diimplementasikan dari waktu ke waktu dengan definisi yang berbeda. Dalam konteks masa lalu kemandirian ekonomi adalah upaya dalam mengatasi persoalan krisis ekonomi dalam masyarakat akan tetapi dalam konteks kekinian adalah upaya alternatif untuk mengatasi krisis lingkungan akibat globalisasi. Saat ini kemandirian ekonomi dianggap sebagai upaya dalam menemukan arah pembangunan masa depan, jalan tengah, terutama sekarang dengan proses mengejar ekonomi dan pembangunan sosial untuk mengimbangi globalisasi. Sebagai janji masa depan, kemandirian ekonomi memastikan keseimbangan dan kesiapan untuk menghadapi perubahan yang cepat dan ekstensif sehubungan dengan material, masyarakat, lingkungan, dan budaya (Priyanut Piboolsravut dalam Rhoma Dwi Aria Yuliantri, 2021: 70).

Kemandirian ekonomi adalah sebuah konsep untuk menggambarkan kecukupan secara *relatif*. Kecukupan *relative* sekaligus menjelaskan bahwa kemandirian/swasembada ekonomi, baik dalam teori dan praktik, suatu negara bangsa riil berubah seiring dan karena zaman berubah (Geogrege Otis Smith, dalam Rhoma Dwi Aria Yuliantri, 2021: 70). Ditinjau dari bentuk dan fungsi

kemandirian ekonomi pada level-level yang universal dapat diaplikasikan dalam domain yang lebih kecil seperti individu, keluarga, komunitas (desa) maupun dalam skala yang lebih besar seperti dalam kebijakan ekonomi negara dengan domainnya warga negara dalam wilayah tertentu (Priyanut Pibbolsravut, Rhoma Dwi Aria Yuliantri, 2021: 70). Dalam kerangka ekonomi global kemandirian ekonomi tak jarang ditautkan sebagai suatu gagasan untuk menentang imperialisme. Meskipun demikian, kemandirian ekonomi bukanlah suatu doktrin yang secara total menutup diri dari dunia luar (pihak lain) (Leo Grebler dalam Rhoma Dwi Aria Yuliantri, 2021: 70).

Kemandirian ekonomi menurut Mahdi Hadavi Tehrani adalah keadaan ketika masyarakat, kelompok, organisasi, negara dapat bereproduksi dan mampu memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi (dalam Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Mukhlis Muhammad Nur, dan Ichsan, 2022: 4). Andriyani, Nailufar, and Yurina mengemukakan bahwa kemandirian ekonomi adalah kemampuan diri sendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera (dalam Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Mukhlis Muhammad Nur, dan Ichsan, 2022: 4).

Menurut Dahlan Iskan, kemandirian ekonomi hanya dapat diperoleh jika kegiatan produksi dilakukan sendiri di dalam negeri dan tidak terlalu mengandalkan bahan baku dari luar negeri. Sebetulnya tidak menjadi masalah

jika Indonesia menjadi pasar produk-produk luar negeri, selama Indonesia juga memiliki produk-produk unggulan yang kompetitif untuk dipasarkan ke luar negeri. Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Mukhlis Muhammad Nur, dan Ichsan, 2022: 4) mengemukakan bahwa kemandirian ekonomi dapat terwujud bila memberikan pemahaman tentang ekonomi kepada santri (masyarakat), memberdayakan, mengorganisir pesantren (wadah), dan membangun unit usaha, serta melakukan kerjasama dengan pihak luar (pesantren).

b. Faktor/Aspek Penghambat Kemandirian Ekonomi

Dalam membangun kemandirian ekonomi terdapat empat aspek yang menghambat kemandirian ekonomi, yaitu aspek pemasaran, jaringan, kapabilitas, dan permodalan, Bank Indonesia (dalam Maya Silvana dan Deni Lubis, 2021: 133). Dalam aspek pemasaran yaitu terbatasnya akses pasar untuk menjual hasil produksi. Dalam aspek jaringan yaitu keterbatasan *networking* baik sisi *supply* maupun *demand*. Dalam aspek kapabilitas yaitu keterbatasan kapabilitas untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Dalam aspek permodalan yaitu keterbatasan permodalan sendiri dan akses ke lembaga keuangan. Bauran strategi pemasaran tersebut meliputi pengembangan produk, strategi harga, strategi distribusi, dan promosi, Maya Silvana dan Deni Lubis, (2021: 133).

c. Indikator Kemandirian Ekonomi

Menurut Priambodo sebagaimana yang dikutip oleh Djazimah, mengatakan bahwa secara konseptual, kemandirian ekonomi memiliki parameter tertentu diantaranya:

- 1) Kemandirian ekonomi seseorang ditandai oleh adanya usaha atau pekerjaan yang dikelola secara ekonomis. Artinya, usaha atau pekerjaan itu berorientasi pada keuntungan.
- 2) Kemandirian juga berangkat dari rasa percaya diri seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti usaha dagang, wirausaha dalam bentuk home industri, pengelolaan perusahaan dan lain sebagainya.
- 3) Kemandirian ekonomi ditandai oleh kegiatan ekonomis yang ditekuni dalam jangka waktu lama sehingga memungkinkan seseorang mempunyai kekuatan secara ekonomis untuk maju dan berkembang.
- 4) Kemandirian ekonomi juga ditandai oleh sikap berani dari seseorang atau kelompok orang untuk mengambil risiko dalam aktivitas ekonomis, misalnya bermimpi besar dan berusaha keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, berani meminjam uang sebagai modal usaha dengan perhitungan rasional dan realistis, berani mengambil keputusan bersifat bisnis untuk memprediksi peluang - peluang yang ada.
- 5) Kemandirian ekonomi juga dilihat dari sikap seseorang yang tidak terikat kebijakan secara ekonomis oleh orang lain.

6. Pengertian Desa

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah dan juga undang-undang tentang desa, istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah Nagari, di Aceh dengan istilah Gampong, di Papua dan Kutai Barat-Kalimantan Timur disebut dengan istilah Kampung, Marga/Mendope, (Palembang dan Bengkulu), Negeri (Maluku), Banjar (Bali), Desa (Bima), sedangkan di Kabupaten Bantul-DIY disebut dengan istilah Kalurahan. Begitu pula dengan segala institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa setempat. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bkkbn 2016).

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Definisi desa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, selaras dengan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005. Di dalam PP No. 72 tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan di dalam UU No. 6 tahun 2014, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Mantra dalam Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015: 28). Sukidin mengatakan bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (dalam Sandu S. dan M. A. Sodik, 2015: 28).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Mamik. 2015: 3). Bogdan dan Taylor (dalam Mamik, 2015: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Kirk dan Miller (dalam Mamik, 2015: 3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Selanjutnya Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (dalam Mamik, 2015: 3). Penelitian kualitatif menuntut keteraturan, ketertiban dan kecermatan dalam berpikir, tentang hubungan data yang satu dengan data yang lain dan konteksnya dalam masalah yang akan diungkapkan (Mamik, 2015: 4).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Dengan metode kualitatif ini maka dapat menganalisis mengenai *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta.

2. Ruang Lingkup Penelitian

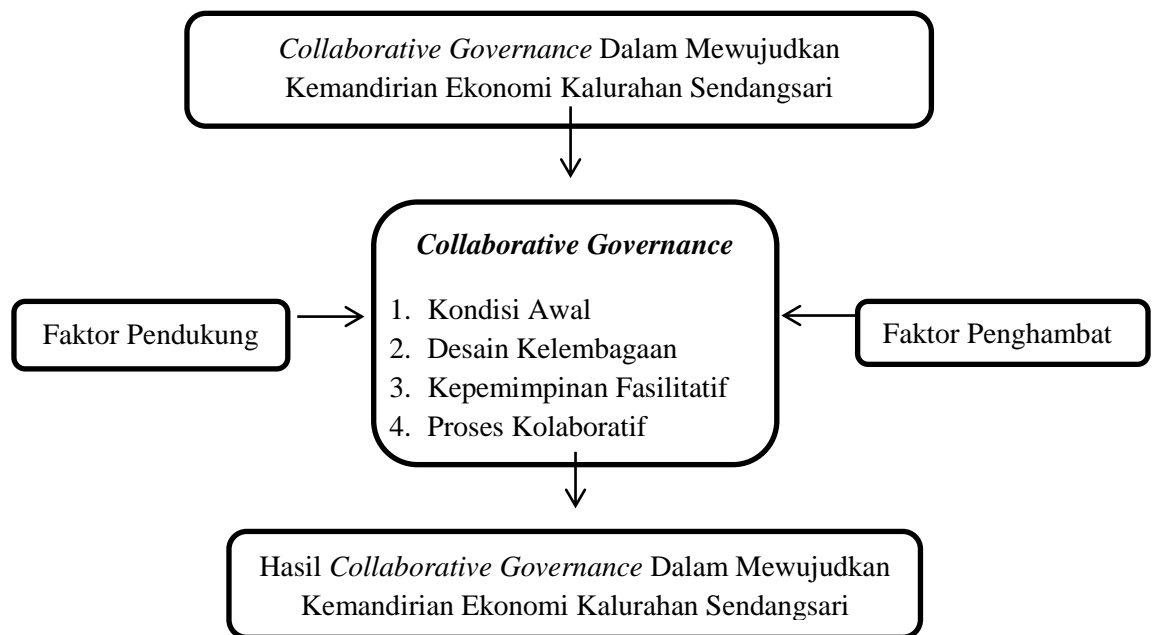
a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau topik permasalahan yang akan dikaji dan diteliti oleh peneliti di tempat penelitian. Variabel ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu masalah yang perlu dicari solusinya sebagai tujuan atas penelitian yang akan dilakukan (Supriyati, 2012: 38). Suharsimi Arikunto (2010: 29) juga mendefinisikan objek penelitian sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari inti problematika pada suatu penelitian. Suharsimi juga menyebutkan bahwa objek di dalam penelitian dapat disebut juga dengan istilah variabel penelitian. Inti problematika pada dasarnya adalah objek yang akan digunakan dalam riset atau bisa juga berupa pusat dari masalah yang ditemukan oleh peneliti yang kemudian akan dianalisis dan diteliti.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objeknya adalah *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari.

b. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan teori yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, maka skema kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini:



Gambar 3.I. Kerangka Pikir.

Sumber: Data Olahan Peneliti berdasarkan teori *collaborative governance* Ansell and Gash (2023).

c. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan, (Moleong, 2007:93). Penelitian ini difokuskan pada bagaimana *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari, dengan dilihat dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, proses kolaboratif dan faktor-faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

d. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka akan dideskripsikan sebagai berikut:

1) Kondisi Awal

Yakni kaitan dengan ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuatan stakeholder yang berbeda, insentif yang harus dikolaborasikan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan, dan sejarah atau pengalaman konflik atau kerja sama di antara para stakeholder yang pernah terjadi di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

2) Kepemimpinan fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif adalah berkaitan dengan manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, dan memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

3) Desain Institusional

Desain institusional atau kelembagaan berkenaan dengan terdapat aturan-aturan dasar yang mengatur *collaborative governance* atau adanya legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi, terdapat keterbukaan atau inklusivitas dari pemerintah dalam proses *collaborative governance* sehingga memungkinkan semua aktor berpartisipasi, dan adanya pembatasan terhadap stakeholder yang tidak relevan dengan tujuan bersama.

4) Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif berkaitan dengan terdapat dialog tatap muka antara para aktor/stakeholder, terdapat rasa saling percaya di antara para aktor/stakeholder, terdapat komitmen antara para aktor/stakeholder dalam proses kolaborasi, terdapat pemahaman bersama antara para aktor/stakeholder dalam proses kolaborasi, dan terdapat hasil sementara yang dicapai dalam proses kolaboratif

5) Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hal-hal yang dapat menunjang, mendorong atau mempengaruhi terjadinya *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

6) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan tidak terjadinya *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

3. Subjek Penelitian

Menurut Spradley (dalam Farida Nugrahani & Hum, M. 2014 :61) subjek penelitian adalah sumber informasi dalam penelitian, sementara itu menurut Moleong (dalam Farida Nugrahani & Hum, M. 2014: 61-62) subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sulisyanto, pelaksana teknis pemerintah Kalurahan Sendangsari di bidang Jagabaya dan Gestria Sari Aji, di bidang Ulu-ulu, serta ketua Gapoktan Sendangsari dan ketua kelompok ternak indukan ayam.

Sulisyanto dipilih karena perannya sebagai perangkat Kalurahan Sendangsari yang membidangi bagian Pemerintahan dan Keamanan (Jagabaya).

Sebagai bagian dari pemerintahan di tingkat kalurahan, Sulisyanto dapat memberikan informasi tentang bagaimana mekanisme collaborative governance berlangsung dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di kalurahan. Dalam konteks mewujudkan kemandirian ekonomi, keamanan menjadi faktor penting karena dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinvestasi dan berusaha. Informasi dari Sulisyanto akan membantu dalam memahami bagaimana pihak pemerintah Kalurahan Sendangsari berkolaborasi dengan masyarakat dan aktor lain untuk mencapai tujuan kemandirian ekonomi.

Gestria Sari Aji dipilih karena perannya sebagai perangkat Kalurahan Sendangsari yang bertanggung jawab atas bagian pembangunan dan kemakmuran kalurahan (Ulu-ulu). Sebagai pemegang posisi ini, Gestria mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang upaya kolaboratif yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di Kalurahan Sendangsari. Keterlibatannya dalam bidang pembangunan dan kemakmuran juga akan membawa perspektif penting tentang upaya kolaboratif antara pemerintah kalurahan, masyarakat, sektor swasta dan dengan LPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program ekonomi.

Sutardi dipilih karena perannya sebagai ketua kelompok ternak di Kalurahan Sendangsari. Sebagai ketua kelompok ternak, Sutardi akan memberikan wawasan tentang bagaimana kelompok masyarakat berperan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi di sektor peternakan. Keterlibatannya dalam organisasi masyarakat tersebut akan membuka ruang untuk mengeksplorasi

bagaimana kolaborasi antara kelompok masyarakat, pemerintah kalurahan, PT. Andhisa Gemilang Farm dan LPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat meningkatkan kondisi ekonomi para peternak.

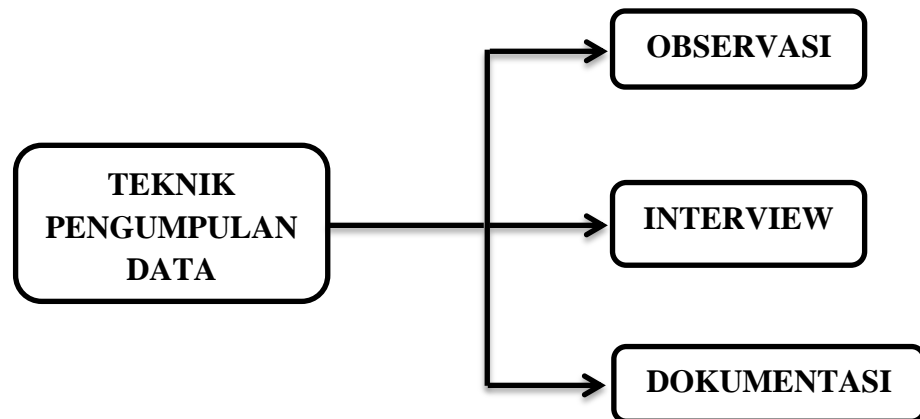
Sementara Sudyono dipilih karena perannya sebagai ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Kalurahan Sendangsari. Sebagai ketua Gapoktan, Sudyono memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan tentang upaya kolaboratif di bidang pertanian dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada kemandirian ekonomi kalurahan. Gapoktan sendiri merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang penting dalam menggerakkan sektor pertanian, dan informasi dari Sudyono akan memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah kalurahan, kelompok tani, dan LPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di Jln. Gesikan Sedayu Km. 04, Benyo, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Gambar 4.1. Teknik Pengumpulan Data

Sumber: Di olah oleh Peneliti.

a. Observasi

Pada teknik ini peneliti melakukan observasi langsung (*direct observation*) terjun ke lokasi penelitian (Kalurahan Sendangsari) untuk mendapatkan informasi yang relevan dan aktual. Pengumpulan data melalui teknik observasi dilakukan karena dapat memberikan manfaat, seperti peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan data sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh, peneliti akan memperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak

diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara, dan peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi informan.

Dalam melakukan observasi, peneliti melihat atau mengamati langsung aktivitas pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi, seperti kegiatan dari kelompok ternak indukan ayam jawa super, pemerintah Kalurahan Sendangsari, dan Gapoktan.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti (Ajat Rukajat, 2018: 24).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung, bertatap muka dengan perwakilan pemerintah Kalurahan Sendangsari, Ketua Gapoktan, dan ketua kelompok ternak indukan ayam jawa super. Instrumen wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan recorder.

Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data karena mempunyai kelebihan, seperti: *Pertama* peneliti dapat melakukan kontak langsung dengan responden sehingga memungkinkan didapatkan jawaban secara bebas dan mendalam. *Kedua*, hubungan dapat dibina lebih

baik, sehingga memungkinkan informan bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas. *Ketiga*, untuk pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dari kedua belah pihak dapat diulangi kembali.

c. Dokumentasi

Menurut Mc. Millan dan Schumacher bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen (dalam M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, 2020: 129). Penelitian ini menggunakan dokumen profil desa Kalurahan Sendangsari tahun 2022, website Kalurahan Sendangsari, foto kegiatan, dan dokumen RPJMKal Sendangsari 2020-2026. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan *interview*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013). Proses analisis ini melibatkan tahapan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Selain itu, penelitian kualitatif juga mencakup pemeriksaan terhadap keabsahan data.

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, klasifikasi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar/mentah” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berarti

menyaring data-data kasar yang non-informatif menjadi data-data halus yang informatif. Peneliti membuang data-data yang dianggap tidak dibutuhkan. Dalam tahapan ini peneliti berusaha memilih dan memilah data-data yang penting, mendukung, dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hanya dengan cara inilah diperoleh gambaran yang jelas mengenai data yang telah terkumpul, yang pada gilirannya memperlancar proses penelitian selanjutnya. Jadi, reduksi data berfungsi membentuk data-data mentah yang banyak lagi terserak menjadi data yang lebih kecil dan sederhana sambil tetap menjaga struktur tujuan penelitian.

Untuk melakukan reduksi dengan baik dan benar, Parwito setidaknya merekomendasikan tiga langkah, yaitu (1), melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. (2), menyusun kode-kode dan catatan-catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas serta proses-proses, sehingga peneliti mendapatkan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksud disini tidak lain adalah gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraf, atau mungkin beberapa paragraf. (3), sebagai langkah akhir dari tahapan reduksi, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data yang bersangkutan (dalam M. Sobry Sutikno dan P. Hadisaputra, 2020: 141).

b. *Data display* (penyajian data)

Display data merupakan tahapan kedua setelah reduksi data. *Display* tidak kalah penting dengan proses reduksi. Melalui proses ini peneliti akan dapat menemukan data yang lebih jelas dan informatif. Sehingga tepat bila *display* didefinisikan sebagai aktivitas terorganisir, yang dikompresi dengan perakitan informasi yang memungkinkan menggambarkan simpulan dan tindakan. Peneliti juga dapat memahami situasi sosial yang sedang terjadi dalam penelitiannya. Sehingga ia lebih tahu tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Untuk memperoleh hasil yang valid, Miles dan Huberman mengingatkan agar proses *display data* dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semakin baik proses penyajian, semakin valid pula analisis kualitatif yang dihasilkan (M. Sobry Sutikno dan P. Hadisaputra, 2020:142).

Dalam tahapan ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau tabel, gambar, dan hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. .

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Analisis ketiga yang tidak kalah penting dengan dua tahapan sebelumnya adalah *conclusion*, yaitu menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Maksimal atau tidak tahapan ini, baik atau tidak kesimpulan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kedua tahapan sebelumnya, reduksi dan *display data*, dan kemampuan peneliti mencari tahu makna fenomena,

kejadian, dan benda yang dijumpai sejak permulaan penelitian. Peneliti juga berusaha mencatat penjelasan mengenai sebab akibat dan proposisinya, serta konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi.

Dalam perspektif Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Peneliti sebaiknya mengutamakan sikap kritis, skeptis dan terbuka untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu kesimpulan harus diverifikasi terus menerus hingga diperoleh kesimpulan “jenuh”, yang tidak memberikan peluang terhadap kesimpulan lain. Hal tersebut dilakukan mengingat penelitian ilmiah adalah penelitian yang dilakukan secara skeptis dan kritis (dalam M. Sobry Sutikno dan P. Hadisaputra, 2020: 142-143).

Dalam konteks penarikan kesimpulan dan verifikasi data, informasi yang berasal dari pemerintah Kalurahan Sendangsari, ketua kelompok ternak, dan ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi elemen penting. Pada tahap ini peneliti menggabungkan data dari sumber-sumber tersebut, sehingga dapat merumuskan kesimpulan yang lebih akurat, dan sebelum penarikan kesimpulan, peneliti melakukan verifikasi sehingga kesimpulan yang diambil menjadi lebih sah dan bermakna.

7. Triangulasi

Guna mencapai tingkat akurasi data yang lebih tinggi, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (dalam Nining, 2017), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengecekan pada data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan perwakilan pemerintah Kalurahan Sendangsari, ketua Gapoktan dan ketua kelompok ternak indukan ayam jawa super.

8. Kendala Pelaksanaan Penelitian

Selama penelitian ini berlangsung, peneliti melakukan dengan baik dan sesuai tahapan. Meskipun demikian, tetap saja memiliki kendala, seperti sulitnya mendapatkan perwakilan PT. Andhisa Gemilangn Farm dan pihak LPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk diwawancarai. Selain itu, peneliti juga mengalami kesulitan dalam memperoleh beberapa dokumen dari pemerintah Kalurahan Sendangsari. Dokumen-dokumen tersebut mencakup daftar hadir para stakeholder yang terlibat dalam forum kolaborasi, dokumen yang memuat tentang rencana dan kebijakan/pogram yang telah disepakati secara bersama oleh para stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi, serta gambar atau foto-foto saat pertemuan antar aktor berlangsung.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kalurahan Sendangsari

Sejak tahun 1946, terjadi perubahan yang sangat signifikan di Sendangsari. Pada awalnya, wilayah ini merupakan sebuah kerajaan dengan pemerintahan yang berbasis monarki. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahannya mengalami perubahan besar dengan beralih ke sistem demokrasi barat. Perubahan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga berdampak pada pemerintahan desa. Selain itu, ada perubahan nama dan pusat pemerintahan di Kalurahan Sendangsari. Pada era penjajahan, wilayah Kalurahan Sendangsari terdiri dari dua Kalurahan yang terpisah. Pertama, Kalurahan Kreet dengan pusat pemerintahan di Benyo, di rumah Bapak Dollah Harun. Kalurahan Kreet meliputi beberapa pedukuhan, seperti Benyo, Jetis, Pajangan, Kayen, Deji Kulon, Beji Wetan, Gupak Warak, Dadabong, Kreet, Kabrokan Wetan, dan Kabrokan Kulon. Kedua, Kalurahan Manukan dengan pusat pemerintahan di Manukan, yang mencakup pedukuhan Kunden, Kamijoro, Manukan, Jaten, Mangir Lor, Mangir Tengah, dan Mangir Kidul.

Kemudian, kedua Kalurahan tersebut digabung menjadi satu dan diberi nama Sendangsari. Nama "Sendangsari" dipilih karena terdapat dua sumber mata air (sendang) yang berlokasi di Dusun Beji Wetan dan Dusun Kunen. Kata "Sari" menggambarkan inti dari kalurahan yang menjadi satu, seperti saripati atau inti yang tak lekang oleh zaman. Hal ini mencerminkan keberadaan air dari Sendang 31

Ngembel/Beji dan Sendang Kunden yang selalu memberikan manfaat bagi masyarakat dan berguna bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, perubahan signifikan di Sendangsari mencakup peralihan dari sistem pemerintahan kerajaan ke demokrasi barat, penggabungan dua Kalurahan menjadi satu, dan perubahan nama serta pusat pemerintahan. Semua perubahan ini menandai transformasi penting dalam sejarah dan perkembangan wilayah ini.

B. Keadaan Geografis

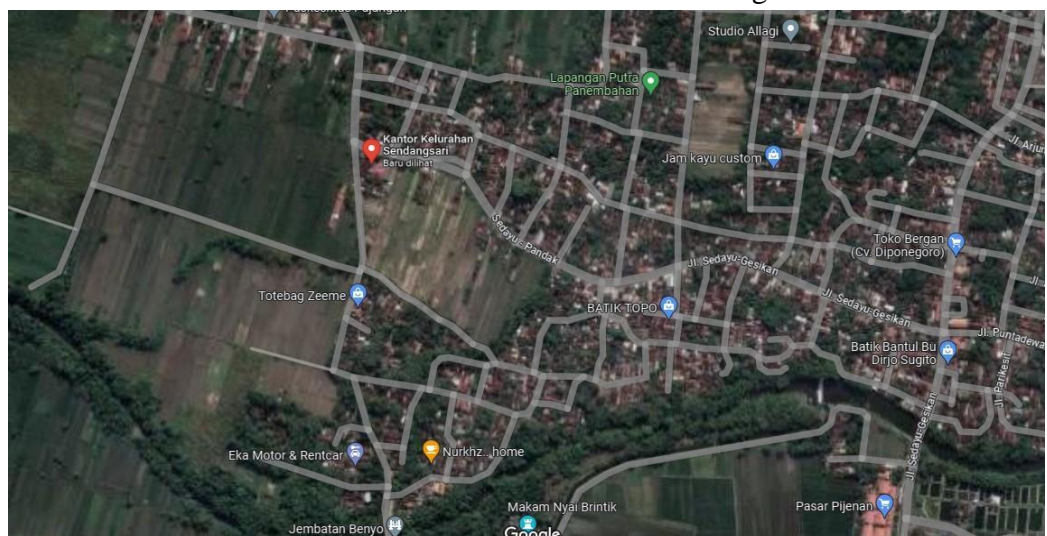
1. Luas Wilayah

Kalurahan Sendangsari adalah sebuah kalurahan yang terintegrasi dalam wilayah Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas mencapai 1.307,1050 hektar.

2. Batas Wilayah

Batas wilayah Kalurahan Sendangsari dapat dilihat pada peta berikut ini:

Gambar 1.II Peta Administrasi Kaluarahan Sendangsari.



Sumber: Google Maps 2023

Peta di atas mendeskripsikan bahwa secara administrasi Kalurahan Sendangsari berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan.

Sebelah Selatan : Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak.

Sebelah Barat : Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo.

Sebelah Timur : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan

3. Keadaan Iklim dan Topografi

Kalurahan Sendangsari terdapat di sisi barat Kabupaten Bantul. Wilayah ini terletak pada ketinggian + 100 m di atas permukaan laut dengan topografi berupa dataran tinggi, suhu udara rata-rata 24°C-37°C, kelembaban 30 dan curah hujan 30 mm. Kalurahan ini memiliki luas wilayah yang terdiri dari 70% bukit dan 30% dataran rendah. Kalurahan Sendangsari memiliki lanskap yang beragam, seperti persawahan, perbukitan, atau hutan, dan sungai.

Faktor geografis ini juga menjadi pertimbangan dalam memilih Kalurahan Sendangsari sebagai lokasi penelitian, karena kalurahan ini terletak di wilayah pedesaan yang subur, desa ini memiliki akses ke sumber daya alam yang penting bagi pengembangan ekonomi lokal. Kondisi geografis seperti ini memberikan potensi yang besar untuk mengembangkan sektor pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta sektor pariwisata.

4. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

Jarak Kalurahan Sendangsari ke Kapanewon Pajangan kurang lebih 3 km, dapat ditempuh dengan waktu sekitar 4 menit. Sedangkan jaraknya dengan ibu Kota Kabupaten Bantul kurang lebih 6 km dapat ditempuh dengan waktu sekitar 12 menit. Sementara jaraknya dengan dengan ibu Kota daerah Istimewa Yogyakarta kurang lebih 25 km dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit.

5. Keadaan Demografi

Pemahaman mengenai kependudukan dalam suatu wilayah merupakan hal yang sangat penting dan relevan dalam suatu pembangunan. Penduduk Kalurahan Sendangsari memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik. Hal ini berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan pedesaan maupun perkotaan.

Jumlah penduduk Kalurahan Sendangsari pada tahun 2023 mencapai 11.712 jiwa, dan Kepala Keluarga (KK) sekitar, 3.658 KK. dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah Penduduk Kalurahan Sendangsari berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini:

Tabel 1.II Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-Laki	5.883
2	Perempuan	5.829
Total		11.712

Sumber: Profil Kalurahan Sendangsari tahun 2022

Dari tabel 1.II, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Sendangsari mencapai 11.222 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 5.883 jiwa dan perempuan sebanyak 5.829 jiwa. Ditinjau dari jumlah tersebut, penduduk Sendangsari antara laki-laki dan penduduk perempuan 54 jiwa lebih banyak penduduk laki-laki.

b. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Tabel 2.II Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	11.414
2	Protestan	98
3	Katolik	153
4	Hindu	37
5	Budha	11
Jumlah		11.712

Sumber: Profil Kalurahan Sendangsari 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.II, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Sendangsari adalah penganut agama Islam. Data juga mendeskripsikan adanya sebagian penduduk yang menganut agama lain, seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa kehadiran komunitas agama yang beragam di Kalurahan Sendangsari mencerminkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 3.II Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Belum masuk TK	656
2.	Sedang TK/play group	362
3.	Sedang sekolah	1.533
4.	Tidak tamat SD	1.422
5.	Tamat SD/ sederajat	1.719
6.	Tidak tamat SLTP	1.723
7.	Tamat SLTA	528
8.	Tamat SMP/ sederajat	315
9.	Tamat SMA/ sederajat	3.159
10.	Tamat D-1/ sederajat	135
11.	Tamat D-3/ sederajat	63
12.	Tamat S-1/ sederajat	80
13.	Tamat S-2/ sederajat	17
Jumlah Total		11.712

Sumber: Profil Kalurahan Sendangsari 2022

Dari data pada tabel 3.II, kita dapat melihat bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Sendangsari telah menyelesaikan tingkat pendidikan dasar dan menengah, sementara tingkat pendidikan tinggi dan lanjutan memiliki jumlah yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalurahan Sendangsari melalui pendidikan harus menjadi pusat perhatian.

d. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 4.II Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.

No	Mata Pencaharian	Jumla Penduduk
1	Petani	810
2	Pegawai Negeri Sipil	236
3	Peternak	253
4	Dokter Swasta	34
5	TNI	25
6	POLRI	40
7	Karyawan Perusahaan Swasta	1.105
8	Karyawan Perusahaan Pemerintah	21
9	Wiraswasta	3.195
10	Tidak Mempunyai Pekerjaan	1.492
11	Pelajar	1.168
12	Ibu Rumah Tangga	1.078
13	Buruh Harian Lepas	2.255
Jumlah Total		11.712

Sumber: Profil Kalurahan Sendangsari 2022

Dari tabel 4.II di atas mengindikasikan bahwa Kalurahan Sendangsari memiliki struktur mata pencaharian yang cukup beragam, dengan sektor pertanian, peternakan, dan wiraswasta menjadi mata pencaharian utama. Namun, sektor pelayanan seperti pegawai negeri sipil, dokter swasta, dan

personel militer serta kepolisian memiliki kontribusi yang lebih terbatas dalam keseluruhan populasi.

- e. Jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja

Tabel 5.II Kualitas Penduduk Angkatan Kerja

Kualitas Penduduk Angkatan Kerja			
No	Penduduk Angkatan Kerja	L. (Orang)	P. (Orang)
1	Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	2.522	1.068
2	Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD	1.161	1.051
3	Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP	1.264	1.027
4	Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA	981	708
5	Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	187	102
6	Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	1.026	615
	Jumlah Total (Orang)	7.141	4.571
		11.712	

Sumber: *Profil Kalurahan Sendangsari 2022*

Tabel 5.II di atas mendeskripsikan tentang kualitas penduduk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam kelompok usia 18-56 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, Jumlah penduduk angkatan kerja yang tidak tamat SD lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Sedangkan jumlah penduduk angkatan kerja yang tamat Perguruan Tinggi relatif lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah laki-laki dalam angkatan kerja

secara keseluruhan lebih tinggi daripada jumlah perempuan. Hal ini bisa mencerminkan perbedaan kesempatan kerja atau peran gender yang mungkin masih mempengaruhi partisipasi tenaga kerja.

f. Jumlah penduduk cacat mental dan fisik

Tabel 6.II Jumlah Penduduk Cacat Mental dan Fisik

No	Data Berdasarkan Penduduk Sendangsari		
	Jenis Cacat	Laki-Laki	Perempuan
1	Tuna Wicara	6	4
	Tuna Rungu	4	6
2	Tuna Netra	9	7
	Lumpuh	2	3
3	Sumbing	3	4
4	Cacat Fisik/tuna daksa lainnya	3	1
5	Idiot	12	9
6	Gila	5	1
7	Stres	4	1
	Autis	0	1
	Jumlah Total (Orang)	48	36
		84	

Sumber: Profil Kalurahan Sendangsari 2022

Tabel 6.II diatas memberikan gambaran tentang jumlah penduduk di Kalurahan Sendangsari yang mengalami berbagai jenis cacat fisik dan mental. Jumlah total penduduk cacat di Kalurahan Sendangsari adalah 48 orang untuk laki-laki dan 36 orang untuk perempuan, dengan total keseluruhan adalah 84 orang. Data ini mencerminkan kondisi kesehatan dan sosial di Kalurahan Sendangsari, serta tantangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi orang-orang dengan kebutuhan khusus.

C. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya Kaluarahan Sendangsari

1. Keadaan sosial

Desa Sendangsari memiliki kondisi sosial masyarakat yang cukup tertata. Buktinya adalah adanya berbagai kelompok sosial baik di tingkat pedukuhan maupun tingkat desa. Beberapa kelompok sosial yang telah terbentuk di Desa Sendangsari antara lain: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), Dasa Wisma, Kelompok-Kelompok Arisan/Simpan Pinjam, Kelompok Jimpitan, Perpolisian Masyarakat, dan Kelompok Gotong-Royong.

Keberadaan kelompok-kelompok ini menunjukkan adanya keteraturan dan upaya dalam masyarakat untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. LPMD berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa, PKK berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna mewadahi pemuda dalam berbagai kegiatan sosial, RT menjadi unit terkecil dalam organisasi masyarakat, Dasa Wisma mengelola data warga, dan Kelompok-Kelompok Arisan/Simpan Pinjam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui kegiatan arisan dan simpan pinjam.

Selain itu, kegiatan sosial di Desa Sendangsari berlangsung dengan baik, meskipun tidak selalu terstruktur secara formal. Budaya gotong-royong melekat kuat di seluruh pedukuhan, yang menunjukkan semangat saling membantu dan bekerja sama antarwarga. Semangat gotong-royong ini merupakan nilai positif

dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan adanya berbagai kelompok sosial dan kegiatan sosial yang berjalan baik, Desa Sendangsari dapat dikatakan memiliki tatanan sosial yang terorganisir dan harmonis. Hal ini mencerminkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam memajukan desa serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesejahteraan bersama.

2. Keadaan Ekonomi

Tabel 7.II Keadaan Ekonomi Masyarakat Sendangsari

Jenis Bidang	Keterangan
a. Peternakan	<p>Jenis Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ternak Ayam b) Ternak Sapi c) Ternak Bebek d) Ternak Kambing e) Ternak Ayam Broiler f) Ternak Domba g) Ternak Anjing h) Ternak Burung Walet i) Ternak Kucing j) Ternak Burung Beo
b. Perikanan	<p>Jenis Ikan dan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ikan Ayam-Ayam b) Ikan Mas

Jenis Bidang	Keterangan
	c) Ikan Mujair d) Ikan Lele e) Ikan Nila f) Ikan Gurame g) Ikan Katak
c. Perkebunan	Jenis Komoditas Perkebunan. a) Pepaya b) Jagung c) Cabai d) Pisang e) Melinjo f) Kelapa
d. Pariwisata	a) Petilasan Ki Ageng Mangir b) Wisata Kuliner Khas Wader Goreng dan Gudeg
e. Pertanian	1. Jenis Tanaman Pangan Menurut Komoditas. a) Jagung b) Ubi Jalar c) Cabe d) Tomat e) Mentimun f) Kacang Panjang g) Padi Sawah

Jenis Bidang	Keterangan
	<p>2. Jenis Komoditas dan Buah-Buahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Alpokat b) Mangga c) Rambutan d) Pepaya e) Sawo f) Semangka g) Jambu Air h) Nangka i) Kedondong j) Jambu Klutuk

Sumber: Profil Kalurahan Sendangsari 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Perekonomian masyarakat Kalurahan Sendangsari yang masih mengandalkan pada sektor peternakan, perikanan, Perkebunan, pariwisata dan perkebunan. Hal ini menggambarkan karakteristik masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan alam dan sumber daya alam. Di sektor pertanian, penanaman padi dan palawija (komoditas lainnya seperti Jagung, Ubi Jalar, Cabe, Tomat, Mentimun, Kacang Panjang dll) memegang peranan penting dalam menyediakan pangan bagi masyarakat setempat dan daerah sekitarnya. Sementara itu, di sektor peternakan, keberadaan peternakan ayam, bebek, sapi, dan kambing dll, serta kegiatan perikanan memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan protein hewani dan komoditas lainnya bagi

masyarakat. Peternakan merupakan pilar ekonomi yang turut menciptakan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasokan makanan.

Namun, kendati sektor pertanian dan peternakan masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kalurahan Sendangsari, penting untuk memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Masyarakat perlu mengadopsi teknik pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif pada ekosistem, serta berinvestasi pada inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.

Selain itu, pemerintah setempat dapat berperan aktif dalam mendukung dan memperkuat sektor-sektor ini melalui program-program pelatihan, pendampingan, dan pengenalan teknologi terbaru. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta membuka peluang pasar yang lebih luas baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Di samping sektor pertanian dan peternakan, penting juga untuk merangsang diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor lain yang berpotensi. Misalnya, pengembangan agrowisata yang dapat menggabungkan sektor pertanian dan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu adanya upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan, meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya guna meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi bagi seluruh masyarakat.

3. Keadaan Budaya

Tabel 8.II Keadaan Budaya Kalurahan Sendangsari

Urain Bidang	Jenis Bidang	Keterangan
Budaya	a. Genius Loci (sejarah wilayah tempat tinggal)	Masih Percaya 100%
	b. Kearifan Lokal	a) Masih digunakan 80% b) Tidak digunakan 20%
	c. Sumber Daya Lokal	a) Upacara Dandan Kali b) Padusan c) Upacara Merti Kali d) Upacara Merti Dusun e) Wiwit f) Kenduri g) Gotong Royong h) Upacara Kelahiran i) Upacara Kematian j) Upacara Perkawinan k) Sanggar Tari l) Upacara Pendirian Rumah
	d. Adat dan Budaya	a) Pakain Tradisional b) Bagunan Tradisional c) Kesenian Tradisional d) Peninggalan Sejarah

Sumber: Profil Kalurahan Sendangsari 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa masyarakat Desa Sendangsari sangat kental dalam melestarikan adat budaya warisan nenek moyang Indonesia. Budaya khas pedesaan sendangsari yang dijaga dengan baik antara lain gotong-royong, selamatan, dan merti dusun. Berbagai kegiatan seni budaya juga terus berjalan di Desa Sendangsari, seperti Merti Dusun/Desa, Kenduri, Upacara Kematian, Upacara Perkawinan, Sanggar Tari, Upacara Pendirian Rumah dan lainnya. Dengan potensi kesenian yang dimiliki sendangsari menjadi suatu keunikan yang perlu dikembangkan dan dilestarikan.

Demikian juga kalurahan sendangsari juga memiliki berbagai kegiatan yang mendukung pariwisata dan pelestarian seni budaya, seperti Grebeg Kreet di dusun Kreet, Umbul Do'a Puja Basuki di Tapak Tilas Ki Ageng Mangir, dan Bersih Dusun atau Majemukan dengan pertunjukan wayang kulit. Terdapat pula potensi wisata di dusun Mangir, seperti Petilasan Ki Ageng Mangir dan kuliner khas wader goreng dan gudeg manggar di dusun Ngancar. Di dusun Kabrokan Kulon dan Kreet, terdapat wisata alam berupa air terjun yang dikelilingi oleh pepohonan khas daerah perbukitan. Selain itu, di dusun Beji Wetan terdapat potensi wisata alam dan sejarah, yaitu Sendang Ngembel yang merupakan mata air tak pernah kering dan digunakan untuk irigasi lahan pertanian di Desa Sendangsari. Semua potensi ini berkontribusi dalam memajukan pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah Desa Sendangsari.

D. Sarana dan Prasarana Kalurahan Sendangsari

1. Prasarana dan Sarana Pendidikan

Tabel 9.II Prasarana Pendidikan

No.	Fasilitas Pendidikan	Keterangan
1	Gedung TK	7 Unit
2	Gedung SD/Sederajat	5 Unit
3	Gedung SMP/Sederajat	2 Unit
4	Gedung Tempat Bermain Anak	7 Unit
5	Lembaga Pendidikan Agama	18 Unit
6	Perpustakaan Desa/Kalurahan	1 Unit
7	Taman Bacaan	1 Unit
Jumlah		42 Unit

Sumber: Profil Desa/Kalurahan Sendangsari tahun 2022

Dari tabel, dapat diketahui bahwa Kalurahan Sendangsari telah menyediakan berbagai fasilitas pendidikan yang meliputi TK, SD, SMP, tempat bermain anak, lembaga pendidikan agama, perpustakaan, dan taman bacaan. Kehadiran fasilitas-fasilitas ini berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan bagi warga Kalurahan Sendangsari serta mendukung perkembangan anak-anak dan masyarakat setempat

2. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Tabel 10.II Prasarana dan Sarana Kesehatan

No.	Prasarana Kesehatan	Keterangan
1.	Puskesmas	1 Unit
2	Puskesmas Pembantu	1 Unit
3	Poliklinik/Balai Pengobatan	3 Unit
4	Posyandu	25 Unit
5	Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta	3 Unit
6	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	1 Unit
7	Rumah Bersalin	3 Unit
8	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	3 Unit
Jumlah		40 Unit

Sumber: Profil Desa/Kalurahan Sendangsari tahun 2022

Dari tabel 10.II diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan prasarana kesehatan di Kalurahan Sendangsari sebanyak 40 unit, yang mencakup berbagai fasilitas untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara umum dan khususnya untuk ibu dan anak. Keberadaan berbagai jenis prasarana ini dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan di Kalurahan Sendangsari.

3. Fasilitas Peribadatan

Tabel 11.II Fasilitas Peribadatan di Kalurahan Sendangsari.

No.	Pedukuhan	Masjid (Unit)	Mushola (Unit)	Gereja (Unit)
1	Benyo	2	2	-
2	Jetis	1	2	-
3	Pajangan	1	1	-
4	Kayen	2	3	-
5	Beji Wetan	1	1	-
6	Beji Kulon	2	2	-
7	Gupakwarak	1	4	-
8	Dadapbong	1	2	-
9	Krebet	1	2	-
10	Kabrokan Wetan	1	1	-
11	Kabrokan Kulon	1	1	-
12	Kamijoro	2	2	1
13	Kunden	1	2	-
14	Manukan	2	1	-
15	Jaten	1	1	-
16	Mangir Lor	1	1	-
17	Mangir Tengah	-	3	-
18	Mangir Kidul	-	2	-

No.	Pedukuhan	Masjid (Unit)	Mushola (Unit)	Gereja (Unit)
	Jumlah	21	33	1
	Total	55 Unit		

Sumber: Profil Desa/Kalurahan Sendangsari tahun 2022

Tabel 11.II diatas mendeskripsikan bahwa Kalurahan Sendangsari memiliki banyak fasilitas peribadatan bagi umat Islam, terdiri dari 21 unit masjid dan 33 unit mushola. Fasilitas peribadatan Islam tersebut lebih banyak tersedia dan tersebar dengan baik di seluruh padukuhan. Meskipun terdapat fasilitas gereja, namun jumlahnya terbatas, menandakan adanya minoritas warga yang beragama Kristen Kalurahan Sendangsari.

4. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Sendangsari

Tabel 12.II Sarana dan Prasarana Kelembagaan

No.	Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Jumlah Unit
1.	LKMD/LPM atau sebutan lain	
	Memiliki kantor sendiri	1
	Peralatan Kantor: Komputer, fax	1
	Mesin Tik	0
	Kardek	0
	Buku Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	0
	Jumlah meja dan kursi	0
	Buku Administrasi	0
	Jumlah Kegiatan	0
2.	PKK	
	Gedung/Kantor	1

	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	1
	Kepengurusan	1
	Buku Administrasi PKK	1
	Kegiatan	1
	Jumlah Kegiatan	3
3.	Karang Taruna	
	Kepengurusan	1
	Buku Administrasi	1
	Jumlah Kegiatan	5
4.	BUMDes	
	Memiliki Kantor/Gedung/Menumpang	1
	Kepengurusan	1
	Buku Administrasi	1
	Jumlah Kegiatan	5

Sumber: Profil Kalurahan Sendangsari 2022

Berdasarkan tabel 12.II diatas dengan data yang sudah disajikan, diketahui bahwa Lembaga kemasyarakatan merupakan pilar penting dalam membentuk dan memperkuat hubungan sosial, budaya, dan ekonomi di suatu wilayah. Namun, dari data yang ada, tampaknya lembaga kemasyarakatan di Kalurahan Sendangsari masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan, yang mana belum terpenuhinya beberapa fasilitas lainnya. Fasilitas ini sebagai penunjang pekerjaan. Jika fasilitas-fasilitas ini belum terpenuhi, dapat mempengaruhi program kerja yang ada, menghambat pekerjaan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah setempat dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan dan

memperjuangkan fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota lembaga kemasyarakatan dapat membantu meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan publik harus menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat Kalurahan Sendangsari dapat mengalami perbaikan yang signifikan dalam kualitas hidup mereka dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan wilayah mereka secara keseluruhan.

E. Lembaga Ekonomi

Tabel 13.II Kelembagaan Ekonomi

No.	Lembaga Ekonomi	Jumlah Unit
Lembaga Ekonomi dan Unit Usahanya		
1	Koperasi Unit Desa	1
2	Koperasi Simpan Pinjam	3
3	BUMDes	1
Jumlah Total		5
Jasa Lembaga Keuangan		
4	Lembaga Keuangan Non-BANK	1
5	BANK Pemerintah	1
Jumlah Total		2
Jasa dan Perdagangan		
6	Usaha Toko/Kios	36
7	Warung Serba Ada	10
8	Toko Kelontong	48
9	Usaha Peternakan	2.487
10	Usaha Perkebunan	420
11	Penitipan Kendaraan Bermotor	6
Jumlah Total		3.007
Jasa Keterampilan		
12	Tukang kayu	12

No.	Lembaga Ekonomi	Jumlah Unit
13	Tukang Servis Elektronik	2
14	Tukang Pijat/Pengobatan	2
Jumlah Total		16

Sumber: Profil Kalurahan Sendangsari 2022

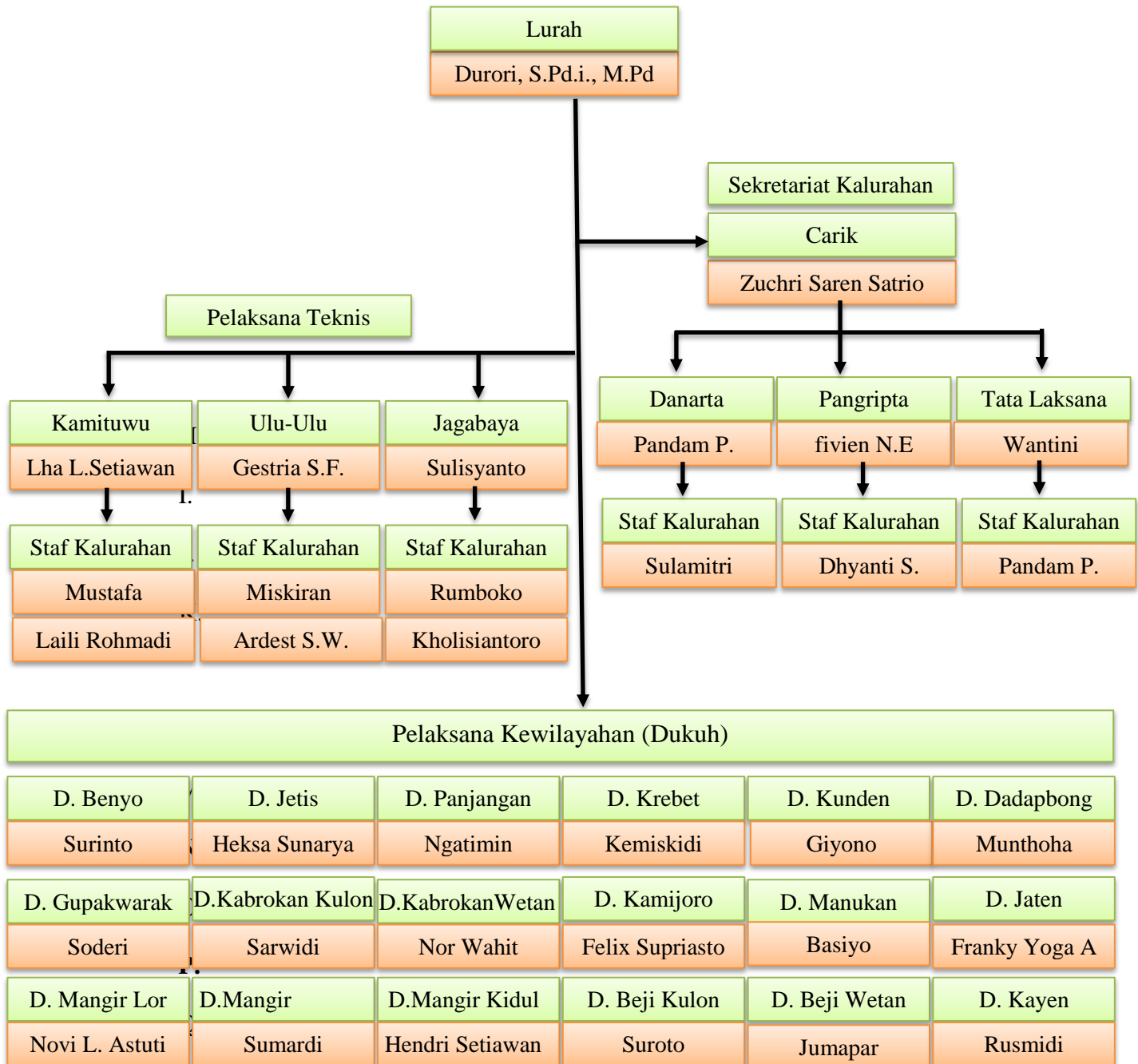
Dari tabel 13.II menunjukkan bahwa Lembaga ekonomi di Kalurahan Sendangsari memiliki peran penting sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan menjadi peluang dalam meningkatkan usaha di wilayah tersebut. Keberadaan lembaga ekonomi dengan unit usahanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu contoh lembaga ekonomi yang signifikan adalah koperasi pertanian atau koperasi peternakan yang berperan sebagai wadah bagi petani dan peternak untuk berkolaborasi. Selain itu, koperasi juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan dalam membantu meningkatkan kualitas produk dan diversifikasi komoditas. Selanjutnya, adanya lembaga keuangan mikro di Kalurahan Sendangsari seperti bank perkreditan rakyat (BPR) atau koperasi simpan pinjam juga berperan penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank-bank besar. Lembaga keuangan mikro ini dapat memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga yang terjangkau dan mengurangi beban finansial bagi para pengusaha kecil dan menengah di wilayah tersebut. Selain itu, lembaga keuangan mikro juga dapat memberikan layanan tabungan dan produk keuangan lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Keberadaan lembaga ekonomi dengan unit usahanya juga memberikan peluang bagi pengembangan usaha skala kecil dan menengah di Kalurahan Sendangsari. Misalnya, lembaga ekonomi tersebut dapat membantu masyarakat untuk membuka warung, toko kelontong, atau usaha kreatif lainnya yang sesuai dengan potensi lokal dan permintaan pasar. Melalui sinergi antara lembaga ekonomi dan unit usahanya, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap bahan baku, pendanaan, dan pasar. Hal ini akan memberikan dorongan positif bagi kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang berdaya saing.

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, kreativitas masyarakat, dan dukungan dari lembaga ekonomi yang ada, diharapkan Kalurahan Sendangsari dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Selain itu, penguatan lembaga ekonomi juga dapat menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi wilayah tersebut.

F. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Gambar 2.II Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sendangsari.



Sumber: Dokumen Pemerintah Kalurahan Sendangsari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Awal

Sebelum kolaborasi yang melibatkan pemerintah Kalurahan Sendangsari, masyarakat, PT. Andhika Gemilang Farm, dan LPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari dilakukan, terlihat adanya ketidakseimbangan sumber daya atau kekuatan yang dimiliki oleh para stakeholder yang ada di Kalurahan Sendangsari. Dari perspektif sejarah kerjasama, pemerintah Kalurahan Sendangsari sebelumnya telah menjalin kolaborasi dengan PT. Ameaya Livingstyle Indonesia serta masyarakat lokal. Kerjasama tersebut dalam program perbaikan/peningkatan infrastruktur jalan lingkungan kalurahan. Namun, terdapat juga catatan konflik di masa lalu, dimana terjadi ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Konflik ini berakar pada kurangnya responsivitas pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam upaya memastikan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat dalam kolaborasi saat ini,

pemerintah Kalurahan Sendangsari memberikan insentif baik dalam bentuk materi maupun non-materi

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam *collaborative governance* untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, pemerintah Kalurahan Sendangsari mengadakan pertemuan, mendorong pemangku kepentingan untuk terlibat aktif, dan menjalin komunikasi yang efektif dengan para stakeholder serta mesosialisasikan setiap informasi yang relevan dengan agenda kolaboratif. Dalam hal meningkatkan kemampuan masyarakat, pemerintah Kalurahan Sendangsari melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan LPP Kapanewon Pajangan memberikan pelatihan dan bimbingan. Hal yang sama juga dilakukan oleh LPM Universitas Atma Jaya dan PT. Andhisa Gemilang Farm. Sebagai upaya mewujudkan keputusan yang kredibel dan meyakinkan, semua aktor dilibatkan dalam proses kolaborasi, dan diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan atau pandangan, serta menyediakan informasi yang relevan.

3. Desain Institusional

Pelaksanaan kolaborasi di Kalurahan Sendangsari dilegitimasi oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan. Di antara peraturan tersebut adalah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa serta Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi ini menggunakan pendekatan inklusivitas partisipatif, dimana para

stakeholder diundang dan dilibatkan dalam setiap tahapan proses kolaboratif. Meskipun demikian, tidak semua pemangku kepentingan dapat terlibat dalam kolaborasi ini, melainkan hanya aktor-aktor yang memiliki visi, dan tujuan yang sejalan.

4. Proses Kolaboratif

Pada dimensi ini, terdapat dialog tatap muka yang diadakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kalurahan Sendangsari, LPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta, PT. Andhisa Gemilang Farm, serta masyarakat. Mereka semua saling mempercayai satu sama lain. Selain itu, mereka juga memiliki komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda kolaboratif, dan memiliki persepsi yang sama mengenai permasalahan yang ada di Kalurahan Sendangsari maupun sektor-sektor yang dikembangkan, serta langkah-langkah yang akan diambil.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan Sendangsari, masyarakat setempat, PT. Andhisa Gemilang Farm, dan LPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta, telah tercapai sejumlah hasil yang signifikan. Hasil-hasil tersebut mencakup pengembangan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan, peningkatan produksi ternak ayam hingga mencapai 500.000 ekor per minggu, pengembangan budidaya bawang merah, serta pemberian modal usaha. Kolaborasi ini juga sukses menghasilkan pupuk organik cair dan pestisida hayati, serta mampu merambah pasar yang lebih luas.

5. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan *Collaborative Governance*

Dalam melakukan *collaborative governance* untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalurahan Sendangsari berjalan dengan berbagai rintangan. Beberapa hambatannya seperti terbatasnya anggaran, dan sebagian aktor yang terlibat dalam kolaborasi memiliki kegiatan selain dari agenda-agenda kolaboratif, akibatnya sulit menyelaraskan jadwal pertemuan yang sesuai dengan kesempatan pemangku kepentingan yang lain. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya komunikasi yang intens dan transparan di antara pemangku kepentingan, kepercayaan, komitmen, kesepahaman, dan dukungan dari pihak eksternal.

B. Saran

Penelitian ini mendorong atau menyarankan peneliti di masa akan datang untuk menambah jumlah informan agar mendapatkan data dan informasi yang lebih luas dan sudut pandang yang representatif. Pemerintah Kalurahan Sendangsari perlu membuat peraturan yang memuat ketentuan tentang perjanjian tertulis yang harus disusun sebelum memberikan pinjaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yuliantri, R. D. A., 2021. Menelusuri Wacana Kemandirian Ekonomi Di Indonesia (1920-1965). *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 7(1), 68-75.
- Arifin, S. 2018. Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(3), 315-332.
- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim, 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2021. *Kecamatan Pajangan Dalam Angka 2021*. Kabupaten Bantul: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantu, 2022. *Kecamatan Pajangan Dalam Angka 2022*. Kabupaten Bantul: Badan Pusat Statistik.
- Budihardjo, A., 2017. *Knowledge Management: Efektif Berinovasi Meraih Sukses*. Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing.
- Djazimah, S. (2004). Potensi Ekonomi Pesantren. *Jurnal penelitian agama*, 1, 427.

- Dirjen. Pembangunan Desa Dan Perdesaan KDPDTT. RI. 2022. Ebook Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tahun 2022: Provinsi-Kabupaten-Kecamatan-Desa.
- Fanani, A. F., & Ibrahim, S. 2018. Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa: Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 1-18.
- Fatikasari, P. 2020. *Determinant Willingness To Pay Untuk Mitigasi Risiko Stunting Di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul (Pendekatan Contingent Valuation Method)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. 2021. Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi di Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502-513.
- Hakim, A. F., Nur, M. M., & Ichsan, I. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. *al-Amwal*, 5(2), 1-16.
- Hendriyani, Rizka, et. al., 2017. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Huzaini, A., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. 2022. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2).
- Islamy, H. La Ode Syaiful, 2018. Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish.

- Krisnawati, Lina et. al., 2019. Membangun Kemandirian Ekonomi Desa melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Pedesaan. dalam Jurnal Maksipreneur, Vol. 8 No. 2, Juni 2019, hal. 114 – 130.
- Marwantho, 2021. *Strategi Pengembangan Desa Menuju Desa Mandiri Di Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanuddin.
- Mamik, 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mustari, M., dan M. Taufiq Rahman. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica.
- Moleong, Lexy J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mungkasa, O., 2022. *Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan Ruang sebagai Wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan*.
- Mukhlis, Maulana, dan Imam Mustofa, 2020. *Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Pondok Pesantren*. Bantul Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nurma Sari, Fitria, 2019. Membangun Kemandirian Ekonomi untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Program “Bela Beli Kulon Progo”. *Telaah Bisnis*, Volume 20, Nomor 1, Juli 2019.
- Nugrahani, F., & Hum, M., 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakrabooks.

- Pangestuti, E., Nuralam, I. P., Furqon, M. T., & Ramadhan, H. M. (2018). Peta potensi dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa. *Journal of applied business administration*, 2(2), 258-266.
- Parker, 2006. *Developing Children's Independence and Esteem*. Diterjemahkan oleh Bambang Wibisono. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rukajat, A., 2018. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Sleman: Deepublish.
- Rahmawati, A. 2016. *Kolaborasi antar daerah pawonsari dalam penyelesaian konflik antar nelayan di Perairan Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)
- Supriyati, 2012. *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*. Bandung: LABKAT.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian* (Cetakan 1, Vol. 7, Issue 2). Sleman: Literasi Media Publishing.
- Surya, Syam, 2018, *Postmodern Economics Kajian Pemikiran Amartya Sen*. Koekoesan.
- Silvana, M., & Lubis, D. 2021. Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung). *AL-MUZARA'AH*, 9(2), 129-146.
- Trisniati, E., Cadith, J., & Nugroho, K. S., 2021. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).
- Ulum, M. C., & Ngindana, R., 2017. *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.

- Wekke, Ismail Suardi, et. al., 2019, *Metode Penelitian Sosial*. Kulonprogo Yogyakarta: Gawe Buku (CV. Andi Karya Mandiri).
- Waliah, Siti, et al., 2022. *Collaborative Governance (Dalam Perspektif Administrasi Publik)*. Bandung-Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.
- O'Flynn, J., & Wanna, J. 2008. *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* (p. 201). Anu Press.
- Yuliantri, R. D. A. (2021). Menelusuri Wacana Kemandirian Ekonomi Di Indonesia (1920-1965). *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 7(1), 68-75.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

C. Referensi Tambahan:

- Anwar, M. C. (2022, Oktober 24). *Kegiatan Ekonomi: Pahami Perbedaan Produksi, Distribusi, dan Konsumsi*. Diakses November 09, 2022, pukul 5.11, dari money.kompas: <https://money.kompas.com/read/2022/10/24/132257926/kegiatan-ekonomi-pahami-perbedaan-produksi-distribusi-dan-konsumsi?page=all#>
- Bastaman, A. (2020, Juni 3). *Ekonomi Biru: Prinsip kemandirian*. Diakses Oktober 31, 2022, pukul 5.25, dari Gemari: <https://gemari.id/gemari/2020/6/3/ekonomi-biru-prinsip-kemandirian>

- Badan Pusat Statistik. (2022, Juni 08). *Lebih dari Separuh Pengangguran Berusia 15-29 Tahun pada Februari 2022*. Diakses Oktober 23, 2022, dari databoks.katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/08/lebih-dari-separuh-pengangguran-berusia-15-29-tahun-pada-februari-2022>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022, Juli 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022*. Diakses 23 Oktober, 2022, dari [www.bps:](http://www.bps.go.id) <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2022). *Indikator Kesejahteraan Meningkat, Bukti Pemulihan Ekonomi Berkualitas*. Diakses Oktober 23, 2022, dari Fiskal.kemenkeu: [https://fiskal.kemenkeu: https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/360](https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/360)
- Bank Syariah Metro Madani. (2020). *Pandemi Covid19, Momentum Ciptakan Kemandirian Ekonomi*. Diakses Oktober 31, 2022, pukul 2.59, dari [www.banksyariahmetromadani:](http://www.banksyariahmetromadani.co.id) http://www.banksyariahmetromadani.co.id/post-pandemi_covid19__momentum_ciptakan_kemandirian_ekonomi.html.
- BKKBN. (2016). *Pulau Panggung*. Diakses November 23, 2022, pukul 20.04, dari [Kampungkb.bkkbn:](https://kampungkb.bkkbn.go.id) <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/20872/pulau-panggung>
- Damanhuri, D. S. (2020). *Kemandirian Ekonomi: Strategi Pembangunan Ekonomi yang Mengutamakan Kepentingan Nasional atas Asing*. Dipetik November, 09, 2022, dari [www.republika:](http://www.republika.id) <https://www.republika.id/posts/7494/kemandirian-ekonomi>

- Idris, M. (2021, Desember 12). *Kegiatan Ekonomi: Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Contoh-contohnya*. Diakses November 09, 2022, pukul 2.58, dari money.kompas: <https://money.kompas.com/read/2021/12/12/201653626/kegiatan-ekonomi-pengertian-jenis-tujuan-dan-contoh-contohnya?page=all>
- Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD). (2022). *Kemiskinan Turun, Kemenkeu Ungkap Faktor Pemicunya*. Diakses Oktober 23, 2022, dari www.kppod: <https://www.kppod.org/berita/view?id=1122>
- Ma'soem, U. (2020). *Apakah Bangsa ini Sudah Mandiri dalam Ekonomi?* Diakses November 22, 2022, dari Masoemuniversity: <https://masoemuniversity.ac.id/berita/apakah-bangsa-ini-sudah-mandiri-dalam-ekonomi.php>.
- Muthmainnah. (2021). *Pengertian Ekonomi Secara Umum dan Menurut Para Ahli*. Diakses November 08, 2022, dari Sumbernesia: <https://sumbernesia.com/pengertian-ekonomi/>
- Shaid, N. J. (2022, Januari 16). *Produksi sebagai Kegiatan Ekonomi yang Menghasilkan Barang dan Jasa*. Diakses November 09, 2022, pukul 5.39, dari money.kompas: <https://money.kompas.com/read/2022/01/16/201800526/produksi-sebagai-kegiatan-ekonomi-yang-menghasilkan-barang-dan-jasa?page=all#page2>
- Yakesma. (2021). *Bangkitkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Yakesma Bantu Petani Kambing dan Domba*. Diakses November 21, 2022, pukul 20.21, dari Yakesma: <https://yakesma.org/bangkitkan-kemandirian-ekonomi-masyarakat-yakesma-bantu-petani-kambing-dan-domba/>

Lampiran:

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : *Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta.

Peneliti : Amirullah

Program Studi : Pembangunan Sosial

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

A. Tujuan wawancara

Memperoleh data tentang peran pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam membangun *collaborative governance* untuk mewujudkan kemandirian ekonomi kalurahan dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam melakukan *collaborative governance* di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

B. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Agama :

Jabatan :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

C. Waktu Wawancara

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

PERTANYAAN UNTUK INFORMAN

A. KONDISI AWAL (*STARTING CONDITIONS*).

1. Ketidakseimbangan Antara Sumber Daya atau Kekuatan Stakeholder Yang Berbeda.

- a) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai sumber daya/kekuatan yang dimiliki oleh stakeholder yang ada di Kalurahan Sendangsari. Apakah seimbang atau tidak?
- b) Apa saja sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder tersebut?
- c) Diantara para stakeholder yang telah disebutkan tadi, siapa yang memiliki sumber daya atau kekuatan yang lebih besar, jika dibandingkan dengan stakeholder yang lain?

2. Sejarah Kerjasama.

- a) Apakah di masa lalu para stakeholder yang ada di kalurahan ini, termasuk pemerintah Kalurahan Sendangsari pernah berkerjasama?
- b) Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam berkolaborasi tersebut?
- c) Dapatkah Bapak/Ibu menceritakan sejarah kerjasama antar stakeholder tersebut?

3. Sejarah Konflik

Apakah di masa lalu pernah terjadi konflik atau perselisihan di antara para stakeholder yang ada di Kalurahan Sendangsari, termasuk stakeholder yang terlibat dalam kerjasama tadi? Kalau pernah, bagaimana konflik tersebut bisa terjadi ada apa penyebabnya?

d) Insentif

- a) Apakah pemerintah Kalurahan Sendangsari pernah memberikan insentif terhadap pemangku kepentingan sebelum kolaborasi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari di mulai atau saat kolaborasi ini berjalan?
- b) Apa saja jenis-jenis insentif yang pernah diberikan dan siapa saja stakeholder yang pernah menerima insentif tersebut?

B. KEPEMIMPINAN FASILITATIF (*FACILITATIVE LEADERSHIP*)**1. Manajemen yang Cukup Terhadap Proses Kolaborasi.**

- a) Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kepemimpinan fasilitatif dalam konteks kolaborasi?
- b) Apa saja langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk memastikan manajemen yang cukup dalam proses kolaborasi?
- c) Hal apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Sendangsari dalam memastikan semua pemangku kepentingan memahami tujuan bersama, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari?
- d) Dalam berkolaborasi, tentu setiap stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Apakah dalam kolaborasi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari ini setiap pemangku kepentingan pernah diberikan tugas dan tanggung jawab?

2. Pengelolaan Kemampuan Melaksanakan Kredibilitas Teknis.

- a) Untuk memastikan bahwa para aktor memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dan praktik yang relevan dalam kolaborasi, maka diperlukan pelatihan dan pengembangan. Apakah pemerintah Kalurahan Sendangsari pernah memberikan atau menyediakan pelatihan dan pengembangan yang tepat kepada para stakeholder untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka? Misalnya berupa pelatihan formal, workshop, atau mentoring oleh tim/orang yang lebih berpengalaman.

- b) Apakah pemerintah Kalurahan Sendangsari menjalin kerjasama/kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian yang berbeda untuk memastikan bahwa semua kebutuhan teknis tercakup?

3. Memastikan Bahwa Kolaborasi Diberdayakan untuk Membuat Keputusan yang Kredibel dan Meyakinkan Bagi Semua Aktor.

- a) Dalam memastikan tidak adanya pihak tertentu yang dominan atau yang utamakan. Apakah para aktor yang terlibat dalam kolaborasi tersebut diberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, baik dalam menyumbangkan pendapat/gagasan maupun dalam proses pengambilan keputusan?
- b) Apakah setiap keputusan itu diambil berdasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan tidak didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu?

C. DESAIN INSTITUSIONAL (*INSTITUTIONAL DESIGN*).

1. Aturan dasar yang mengatur atau yang melegitimasi collaborative governance.

- a) Apakah dalam melakukan kolaborasi ini didasari oleh peraturan/mekanisme?
- b) Peraturan tentang apa saja yang dijadikan sebagai dasar atau melegitimasi kolaborasi tersebut? dan bolehkah saya mendapatkan salinan dari aturan yang dimaksud?

2. Inklusivitas Partisipatif.

Apa langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerinah Kalurahan Sendangari untuk memastikan inklusivitas dalam proses kolaborasi sehingga semua aktor memiliki kesempatan untuk berpartisipasi?

3. *Forum Exclusiveness (Eksklusivitas Forum)*

- a) Apakah para aktor yang terlibat dalam forum kolaborasi itu memiliki keterkaitan dengan isu yang diwacanakan atau memiliki keterkaitan dengan tujuan dari kolaborasi yakni mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari?
- b) Ketika terdapat aktor yang tidak memiliki keterkaitan dengan isu yang diwacanakan atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat. Kirakira bagaimana sikap yang pernah diambil oleh pemerintah Kalurahan Sendangsari?

D. PROSES KOLABORATIF

1. *Dialog Tatap Muka (Face To Face Dialogue).*

- a) Untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama antara aktor yang terlibat dalam kolaborasi, tentu dialog tatap muka sangat diperlukan. Apakah dialog tatap muka pernah diselenggarakan?
- b) Bagaimana proses dialog tatap muka tersebut berlangsung dan siapa saja yang terlibat? Bolehkah bapak/ibu menjelaskannya?

2. *Membangun Kepercayaan (Trust Building)*

- a) Apakah di antara para stakeholder atau aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi saling percaya atau tidak memiliki rasa saling curiga?
- b) Bagaimana rasa saling percaya antara para stakeholder itu bisa terjadi padahal mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan memiliki latar belakang yang berbeda pula? Bolehkah bapa/ibu menjelaskannya!

3. *Komitmen Terhadap Proses (Commitment To Process).*

- a) Bagaimana menurut bapak/Ibu tentang komitmen para pemangku kepentingan terhadap proses kolaborasi?
- b) Apakah para pemangku kepentingan yang berkolaborasi berkomitmen untuk menjalankan tugas dan kewajibannya?

- c) Dalam kolaborasi sering melibatkan berbagai pemikiran dan sudut pandang. Apakah semua stakeholder memiliki komitmen untuk menghargai perbedaan pendapat dan mendorong diskusi yang konstruktif dengan mengedepankan kepentingan bersama?

4. Terdapat Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

- a) Apakah di antara para stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi memiliki pemahaman bersama, baik tentang masalah yang di hadapai, tujuan dari kolaborasi, cara memecahkan masalah maupun tentang hal lain?
- b) Apakah terdapat strategi atau pendekatan khusus yang pernah digunakan dalam proses kolaborasi, sehingga terbentuknya pemahaman bersama di antara stakeholder?
- c) Bagaimana peran pemerintah Kalurahan Sendangsari dalam memfasilitasi terbentuknya pemahaman bersama di antara stakeholder?

5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*).

- a) Apakah ada yang telah dicapai atau dihasilkan melalui kolaborasi ini?
- b) Apa saja hasilnya, boleh bapak/ibu menyebutkan dan menjelaskannya?

E. FAKTOR PENDUKUNG

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi ini?
2. Bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari?

F. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Apa faktor-faktor utama yang menghambat penerapan *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Kalurahan Sendangsari?

2. Bagaimana faktor-faktor tersebut bisa menghambat penerapan *collaborative governance* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Kelurahan Sendangsari?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Sumber: Dok. Pribadi Peneliti



Sumber: Dok. Pribadi Peneliti

Gambar 1. Saat Wawancara dengan Gestria Sari Aji, Pelaksana Teknis Kalurahan Sendangsari Bidang Ulu-Ulu.

Gambar 2. Saat Wawancara dengan Ketua Gapoktan Sendangsari.



Sumber: Dok. Pribadi Peneliti

Gambar 3. Saat Wawancara dengan Ketua Kelompok Indukan Ayam Jawa Super (Anggung Farm Pajangan).



Sumber: Dok. Pemerintah Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan.

Gambar 4. Pelatihan/Bimtek Budidaya Bawang Merah dan Cabe di Hari ke-2



Sumber: Dok. Pemerintah Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan

Gambar 5. Pelatihan/Bimtek Budidaya Bawang Merah dan Cabe di Hari ke-3



Sumber: Dok. Pemerintah Kalurahan Sendangsari.

Gambar 6. Penanaman Perdana Bawang Merah



Sumber: Dok. Pemerintah Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan

Gambar 7. Pelatihan Kewirausahaan



Sumber: Dok. Pemerintah Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan.

Gambar 8. Saat Ketua Gapoktan Sendangsari Menerima Piagam Penghargaan dari Kementan RI



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 444/I/U/2023
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Lamp. : 1 bendel

Kepada Yth,
Lurah Sendangsari
Kapanewon Pajangan
Di
Bantul

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas skripsi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial S1, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu Kepala Desa/Lurah Lurah Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Amirullah
Nomor Mahasiswa : 21510009
Program Studi : Pembangunan Sosial
Jenjang : Strata 1
No. Telpn : +62 823-4149-9012
Keperluan : Melakukan Penelitian
Waktu : Bulan Juni s/d Agustus 2023
Lokasi : Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Topik : *Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A.

Untuk melakukan penelitian lapangan, sebagai bahan penyusunan skripsi.

Atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Ketua



Dr. Sutero Eko Yunanto

NIP. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 259/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, memberikan tugas kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Amirullah
Nomor Mahasiswa : 21510009
Program Studi : Pembangunan Sosial
Jenjang : Strata 1
No. Telpn : +62 823-4149-9012
Keperluan : Melakukan Penelitian
Waktu : Bulan Juni s/d Agustus 2023
Lokasi : Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Topik : *Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Ketua



Dr. Setoro Eko Yunanto

170 230 190

Perhatian :

Setelah selesai melaksanakan penelitian mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Mengetahui :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
KALURAHAN SENDANGSARI

ꦏꦁꦸꦛꦏꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦗꦁꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦺꦤꦁꦱꦂꦶ

Jl. Gesikan-Sedayu Km. 4 Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos. 55751
Telp. 0274 6461718 email : desa.sendangsari@bantulkab.go.id

SURAT IJIN

Nomor : 001/147

Memperhatikan : Surat dari : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
Nomor : 444/I/U/2023
Tanggal : 05 Juni 2023
Perihal : Permohonan ijin Penelitian

Pemerintah Kalurahan Sendangsari, Memberikan Izin kepada :

1. Nama : Amirullah

Untuk melaksanakan **penelitian** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Topik/Judul : Collaboration Governance dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- b. Lokasi : Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan
- c. Waktu Ijin : Juni – Agustus 2023
- d. Status Ijin : Baru
- e. Jumlah Anggota : 1 (satu) orang

Ketentuan Yang harus ditaati :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib memenuhi protocol kesehatan;
4. Izin hanya diberikan untuk kegiatan sesuai izin yang diajukan;
5. Menjaga ketertiban, etika dan dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
6. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum;
7. Pemegang ijin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk **Hardcopy (hardcover)** atau **softcopy** kepada Pemerintah Kalurahan Sendangsari setelah selesai melaksanakan kegiatan;
8. Izin dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Di keluaran di : Sendangsari

Pada Tanggal : 05 Juni 2023

Lurah Sendangsari

Daron, S.Pd.I.,M.Pd.